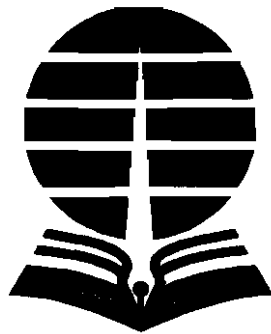


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN
KEBERSIHAN PADA KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PEKUBURAN UMUM
(STUDI KASUS DI KABUPATEN WAKATOBI)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

M U H I D I N

NIM. 014629697

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012**

ABSTRAK

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum. (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi)

Muhidin

Universitas Terbuka
muhidin.dprd@gmail.com

Kata kunci: Faktor, Mempengaruhi, Pelayanan, Kebersihan.

Wakatobi merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan sehingga visi dan misi pemerintah daerah mengarah pada sector pariwisata dan kelautan yang mengharapkan peran kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum lebih lebih maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum.

Dalam penelitian ini menggunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendefinisikan kembali validitas, reliabilitas dan obyektivitas data yang dikumpulkan dalam bentuk informasi secara obyektif dan rasional. Dalam menguji keabsahan data digunakan teknik analisis triangulasi.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi meliputi: (1) Terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menguasai aspek teknis secara profesional di bidang pelayanan kebersihan sehingga menunjukkan kinerja yang tidak maksimal, (2) Sumber daya aparatur tidak memiliki keterampilan khusus di bidang pelayanan kebersihan. (3) Belum memberdayakan masyarakat secara maksimal dalam pelayanan kebersihan. (4) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan (5) Belum memadainya sarana prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum dalam melaksanakan pelayanan kebersihan. Kondisi tersebut mengakibatkan peran kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran dan pekuburan umum dalam pelayanan kebersihan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan guna terwujudnya pelayanan kebersihan yang maksimal.

ABSTRACT

FACTORS THAT AFFECT CLEANLINESS SERVICE AT THE CLEANLINESS OFFICE, GARDENS, FIRE HOUSE AND PUBLIC CEMETERY. (CASE STUDY IN WAKATOBI DISTRICT)

Muhidin
Universitas Terbuka
muhidin.dprd@gmail.com

Key words: factor, influencing, service, cleanliness

Wakatobi is an area that most of its territory consists of the oceans so that the vision and mission of local government direct to tourism and maritime sectors are expected role of cleanliness Office, gardens, Fire Department and the General Cemetery more maximal. This study aims to find out factors that affect the cleaning services at the Cleaning Office, Garden, Fire House and the Public Cemetery

In this research using qualitative descriptive method. This method is used to redefine the validity, reliability and objectivity of the data collected in the form of information in an objective and rational. In testing the validity of the data used triangulation analysis technique.

In conclusion of this study, factors that affect cleaning services at the cleanliness office, fire house, and public cemetery in Wakatobi are: (1) The limited ability of apparatus resources in mastering the technical aspects professionally in the field of cleanliness services so that to show performance is not optimal, (2) Apparatus resources do not have special skill in the field of cleanliness service. (3) It did not empower people a maximal in cleaning services. (4) The low level of public awareness to the cleaning environment (5) it was not suffice infrastructure facilities that are owned by the cleanliness office, garden, fire house, and public cemetery in carry out cleanliness services. The condition to cause role of cleanliness service, garden, fire house and public cemetery in the cleanliness service to the people still need to be improved in order to realize maximal in cleanliness service.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Wakatobi).

NAMA : **Muhidin, S.Pd**

NIM : 014 629 697

PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik

Pembimbing II



Dr. YUNI TRI HEWINDATI
NIP.19590617 198609 2 001

Pembimbing I,

Dr. GUNAWAN, M.Si
NIP. 131 388 181

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Program Magister Administrasi Publik

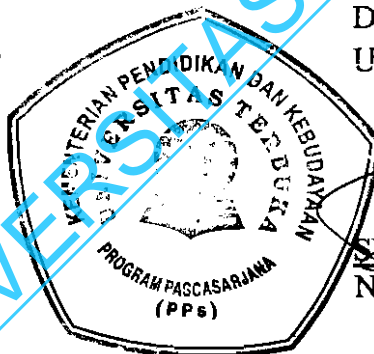


Dra. SUSANTI, M.Si
NIP.19671214199303 2 002

Direktur Prog. Pascasarjana Universitas Terbuka,



SUCIATI, M.Sc.Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



LEMBAR PENGESAHAN TPAM

1. Judul Penelitian : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN KEBERSIHAN PADA KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PEKUBURAN UMUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN WAKATOBI).
2. Identitas Peneliti :
Nama : MUHIDIN, S.Pd
NIM : 014 629 697
UPBJJ : Kendari
Alamat Rumah : Jl. La Ode Sinapu Nomor 88 Wakatobi Sultra
Nomor Tlp. : (0404) 21846 / Hp. 085241653928
3. Pembimbing I :
Nama : Dr. GUNAWAN, M.Si
NIP : 131 885 181
Pangkat/Gol :
Alamat :
4. Pembimbing II :
Nama : Dr. YUNI TRI HEWINDATI
NIP : 19590617 198609 2 001
Pangkat/Gol :
Alamat :

Mengetahui
Ketua Bidang Fisip

Dra. SUSANTI, M.Si
NIP. 19671214199303 2 002

Mengetahui
Direktur PPs

SUCIATI, M.Sc.Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

Pembimbing I,

Dr. GUNAWAN, M.Si
NIP. 131 885 181

Wangi-Wangi,
Peneliti,

MUHIDIN, S.Pd
NIM. 014 629 697

Pembimbing II,

Dr. YUNI TRI HEWINDATI
NIP. 19590617 198609 2 001

2012

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418 Telp. 021-7415050, Fax 021-7415588

Kepada
Yth. Direktur PPs
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Tangerang 15418

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pembimbing TPAM dari Mahasiswa:

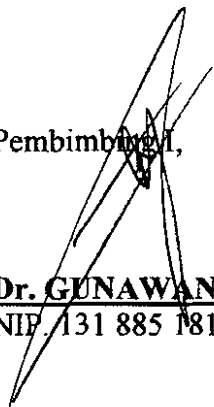
Nama/NIM : MUHIDIN, S.Pd/014 629 697

Judul TPAM : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN
KEBERSIHAN PADA KANTOR KEBERSIHAN,
PERTAMANAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PEKUBURAN
UMUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN WAKATOBI).

Menyatakan dengan seungguhnya, bahwa TPAM dari mahasiswa yang bersangkutan
sudah/baru* selesai sekitar% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji*
dalam Ujian Sidang Program Magister (TPAM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing I,


Dr. GUNAWAN, M.Si
NIP. 131 885 181

Kendari, 2012

Pembimbing II,


Dr. YUNI TRI HEWINDATI
NIP. 19590617 198609 2 001

*) coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **Muhidin**
NIM : 014629697
Program Studi : Administrasi Publik
JUDUL TAPM : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Wakatobi).

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Jumat, 13 April 2012
Waktu : 15.00-17.00
Dan telah dinyatakan : Lulus

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. WAWAN RUSWANTO, M.Si (.....)
Penguji Ahli : Dr. ADI SURYANTO, M.Si (.....)
Pembimbing I : Dr. GUNAWAN, M.Si (.....)
Pembimbing II : Dr. YUNI TRI HEWINDATI (.....)

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Wakatobi)” adalah hasil karya saya sendiri, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Wangi-Wangi, April 2012



Yang Menyatakan,

MUHIDIN, S.Pd
NIM. 014629697

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Suciati, M.Sc.Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas terbuka.
2. Dr. Gunawan, M.Si dan Dr. Yuni Tri Hewindati, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang memberikan bantuan bimbingan selama penulisan tesis ini.
3. Dra. SUSANTI, M.Si, Selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka beserta seluruh staf Pascasarjana.
4. Drs. Wawan Ruswanto, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Kendari beserta staf.
5. Ir. Hugua selaku Bupati Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan magister pada UPBJJ-UT kendari kelas Wakatobi.
6. Drs. Muhammad Husain sebagai atasan langsung penulis yang telah memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di UPBJJ-UT Kendari kelas Wakatobi.
7. Para pejabat dan staf Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi serta pihak lain sebagai informan dalam

penelitian ini yang telah memberikan masukan berupa data dan informasi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Rekan-rekan se angkatan dan se almamater yang telah memberikan masukan, saran dan kritik selama bersama-sama menempuh pendidikan di UPBJJ-UT Kendari Kelas Wakatobi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, semua ini disebabkan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis persembahkan karya tulis ini khusus kepada Istri Tercinta Sunarti, S.Pd dan anak-anakku yang dengan kesetiaan dan keikhlasan mendampingi penulis selama menjalani studi di UPBJJ-UT Kendari Kelas wakatobi, kedua orang tua penulis La Rampe dan Wa Kii, serta almarhum anakku Leonardi yang walau tanpa kehadirannya telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Wangi-Wangi, April 2012

Yang Menyatakan

MUHIDIN, S.Pd

DARTAF ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan TPAM	iv
Surat Keterangan Layak Uji	v
LembarPengesahan	vi
Pernyataan Orisinalitas	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar isi	x
Daftar tabel	xii
Daftar gambar	xiii
Daftar lampiran	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN..	8
A. Deskripsi Teori	8
1. Konsep dan Teori Pelayanan Pubuk	8
2. Faktor-Faktor Pendukung Penyelenggara Pelayanan	20
3. Kebersihan	22
B. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Penafsiran Data	34

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	35
A.	Gambaran Umum	35
1.	Kondisi Geografis	35
2.	Kondisi Demografi	42
3.	Kondisi Perekonomian	45
4.	Kondisi Sosial Budaya	48
5.	Kondisi Sarana Prasarana	55
6.	Kondisi Pemerintahan	59
B.	Strategi Pelayanan	61
C.	Peran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran Dan Pekuburan Umum dalam Pelayanan Kebersihan	62
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	73
1.	Pelayanan Kebersihan.....	73
2.	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	88
3.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pelayanan Kebersihan	96
4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Kebersihan	101
5.	Kesadaran Masyarakat	
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	105
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		107

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.1	Luas masing-masing pulau di Kabupaten Wakatobi	39
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008	44
4.3	Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Wakatobi terhadap PDRB	46
4.4	PDRB Per Kapita Kabupaten Wakatobi, 2003-2005	48
4.5	Persentase Penduduk Kab. Wakatobi Menurut Ijazah	50
4.6	Angka Patisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur	50
4.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan	51
4.8	Persentase Penduduk Yang Melek dan Buta Huruf	52
4.9	Keadaan Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis	53
4.10	Hasil Perolehan Suara Enam Besar Parpol Peserta Pemilu	61
4.11	Perkembangan PNS dan Tenaga Operasional Lapangan (honorar) Pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum Tahun 2008	74
4.12	Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum Tahun 2008	76
4.13	Pembagian tugas Tenaga Operasional Kantor Kebersihan, Pertamanan Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum Tahun 2008	80

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	28
4.1	Peta Wilayah Kabupaten Wakatobi	37
4.2	Peta Posisi Pusat Segitiga Karang Dunia	37
4.3	Peta sebaran 11 Sumber Daya Penting di Wakatobi	38
4.4	Struktur Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten wakatobi	66

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Lampiran	Halaman
1.	Pedoman wawancara	109
2.	Transkrip wawancara	112
3.	Informan Penelitian	128
4.	Riwayat Hidup	130
5.	Riwayat Hidup	130
6.	Instruksi Bupati	131
7.	Izin Penelitian	135
8.	Peta Wilayah Operasional	136
9.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	138

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pertimbangannya menyatakan pada huruf (a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan selanjutnya pada huruf (b) menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pertimbangan diatas sangat jelas sekali mendudukkan bahwa kewenangan yang luas dari pemerintah daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban yang mesti dijalankan yang dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi

dan pemerataan. Artinya otonomi daerah mesti diartikan sebagai suatu mekanisme demokrasi yang memberikan ruang terhadap akses dan kontrol rakyat terhadap semua kebijakan pemerintah termasuk dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi penggunaan jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yang telah dituangkan melalui Keputusan MEMPAN Nomor 63 Tahun 2004 antara lain : (a) Asas Transparansi, (b) Akuntabilitas, (c) Kondisional, (d) Kondisional, (e) Kesamaan Hak, dan (f) Keseimbangan hak dan Kewajiban

Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik telah melakukan beberapa langkah strategis yang telah ditempuh yakni: pada tahun 2007 memekarkan beberapa kecamatan yang awalnya hanya terdiri dari lima kecamatan dengan 59 desa dan kelurahan sehingga memekarkan beberapa desa dan pada tahun 2008 Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yang meliputi 100 (seratus) desa dan kelurahan.

Pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi untuk mempermudah pelayanan umum kepada masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemberian pelayanan, masyarakat melihat bahwa pemerintahan yang berhasil adalah pemerintahan yang memungkinkan terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak mepedulikan oleh siapa pelayanan diberikan, apakah swasta atau pemerintah, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yang penting adalah pelayanan tersebut bisa terjangkau dan kualitasnya dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Sesuai dengan paradigma perencanaan dan pembangunan saat ini, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, sehingga peran serta masyarakat lebih dikedepankan, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada prinsipnya akan menerapkan berbagai pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Proses-proses perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta proses *top-down* dan *bottom up*, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi masyarakat di Kabupaten. Hal ini perlu dilakukan karena kondisi sumber daya manusia (SDM) baik yang ada dalam masyarakat maupun pada jajaran aparatur pemerintahan masih sangat terbatas. Tetapi secara bertahap akan terus dilakukan pembenahan dan perbaikan sehingga akan tersedia sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan yang sejajar dengan berbagai kabupaten lainnya di Indonesia.

Berkaitan dengan upaya pemberian pelayanan, masyarakat melihat bahwa pemerintahan yang berhasil adalah pemerintahan yang memungkinkan terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak mementingkan oleh siapa pelayanan diberikan, apakah swasta atau pemerintah, pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah, yang penting adalah pelayanan tersebut bisa terjangkau dan kualitasnya dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Pelayanan publik yang sifatnya unik dan tidak bisa diambil alih oleh masyarakat selain pemerintah adalah pelayanan kewarganegaraan (*civic services*). Pelayanan tersebut bersifat substantive. Jenis-jenis pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan transportasi termasuk pelayanan dalam bidang kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan pekuburan umum.

Peningkatan pelayanan publik dilihat dari dua hal utama yaitu sejauh mana terjadi peningkatan kualitas pelayanan yang dinikmati masyarakat dan sejauh mana terjadi peningkatan aksesibilitas pelayanan tersebut dari jangkauan masyarakat. Idealnya suatu aktivitas pelayanan bermutu dikembangkan dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara sinergis. Pelayanan publik sebagai suatu proses kinerja birokrasi dipengaruhi oleh budaya organisasi. Dengan kata lain, apapun kegiatan yang dilakukan aparat pelayanan publik haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagai perwujudan dari kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, Rondineli dalam Gaspersz (1997: 27) pernah mengingatkan bahwa penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik adalah kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit; kurangnya tenaga kerja terlatih dan terampil dalam unit lokal; kurangnya sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab; adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang; dan kurangnya infrastruktur teknologi dan infrastruktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik. Demikian juga Walters dalam Sutopo dan Sugianti (1990: 42) menambahkan bahwa kegagalan dari pelayanan publik disebabkan karena aparat birokrasi tidak menyadari adanya perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaya masyarakatnya yang bersifat hirarkis, budaya yang bersifat individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya yang bersifat egaliter.

Seperti halnya Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum bagaimana menciptakan suatu daerah yang asri, indah dan menarik, serta nyaman bagi masyarakat. Akibat dari pergeseran perilaku masyarakat,

pemerintah menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, antara lain masalah perumahan, pengangguran, kesehatan, sampah, dan pajak yang membutuhkan penanganan serius. Permasalahan pemerintahan yang kompleks itu tentu tidak mudah untuk ditangani mengingat kondisi masyarakat yang terus berkembang dan semakin kritis terhadap program-program pemerintah. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas semakin meningkat pula. Hal ini terbukti dari informasi berbagai media massa yang terus memberitakan tuntutan perbaikan layanan.

Tuntutan pelayanan kepada masyarakat untuk semakin baik dan berkualitas tentu tidak bisa dihindari oleh pemerintah, mengingat salah satu fungsi pemerintahan adalah pelayanan (*service*) di samping fungsi lain seperti pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) (Rasyid, 1997: 59). Oleh karena itu pemerintah mempunyai tugas yang tidak ringan dalam mengupayakan pelayanan yang berkualitas seperti yang diinginkan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu memperkuat institusinya dan menyiapkan aparat yang profesional, guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Seiring dengan upaya peningkatan pelayanan, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam upaya menerapkan pelayanan kebersihan telah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis antara lain dengan di keluarkannya Instruksi Bupati dengan Nomor : 88 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Jumat bersih tanpa sampah plastik lingkup pemerintah Kabupaten wakatobi yang di perkuat dengan Instruksi Keputusan Bupati Nomor : 321.A Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan kegiatan jumat bersih tanpa sampah plastik dirubah menjadi pelaksanaan kegiatan sabtu bersih tanpa

sampah plastik lingkup pemerintah Kabupaten Wakatobi . Kedua instruksi tersebut nampak Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam mengimlementasikannya belum membuahkan hasil yang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan kondisi lingkungan masyarakat antara lain: pengaturan pembuangan sampah yang belum tertata sesuai dengan harapan.

Berkaitan dengan hal ini, penulis berminat untuk meneliti Faktor – Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelayanan Kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum di kabupaten Wakatobi.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada apa yang telah dikemukakan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum?
2. Bagaimana peran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum;

- (2) Mengkaji dan menganalisis peran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pemahaman pembaca, khususnya penulis sebagai referensi tambahan dalam memahami Pelayanan kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna: (1) sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Wakatobi dalam mewujudkan visi pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan tugas kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan Umum; (2) sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam melihat kualitas pelayanan kebersihan pada kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan Umum; dan (3) sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Deskripsi Teori

Deskripsi Teori menjelaskan bermacam-macam pengertian konsep dan teori dari beberapa ahli yang terkait dengan masalah penelitian yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi.

1. Teori Tentang Pelayanan Publik

1.1. Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan publik baru menjadi populer di Indonesia berbarengan dengan bergulirnya reformasi. Sebagai sesuatu yang baru, sering terjadi pemahaman yang keliru tentang pelayanan publik antara masyarakat dan pemerintah. Dapat dikemukakan, secara ekstrem terdapat dua jenis barang yaitu, barang publik (*public good*) dan barang swasta (*private good*). Barang publik adalah barang yang penggunaannya memiliki ciri *nonrivalry*, seperti udara, jalan, jembatan, dan sebagainya. Adapun barang swasta dicirikan oleh adanya rivalitas, seperti baja, sepatu dan lain-lain. Baik barang publik dan barang privat di sektor permintaan (*demand*) ditentukan oleh selera konsumen. Barang swasta sektor persediaan ditentukan oleh produsen yang bertujuan mencari untung (*profit motive*), sedangkan barang publik ditentukan melalui proses politik. Di antara keduanya terdapat barang swasta yang memiliki nilai strategis sehingga

mengundang campur tangan pemerintah untuk mengelolanya. Misalnya pangan, industri pupuk, industri kimia, industri otomotif dan sebagainya. Di sisi lain juga terdapat barang publik di mana swasta tertarik untuk mengelolanya seperti jalan tol, sampah, air minum, telekomunikasi dan sebagainya. Semakin strategis arti barang dan jasa bagi pemerintah, semakin besar intervensi pemerintah dalam produksi, distribusi, dan alokasinya.

Pelayanan publik (*public services*) merupakan barang-barang non material, sedangkan barang-barang material disebut dengan barang-barang publik (*public goods*). Barang-barang dan jasa publik ini berkaitan dengan administrasi dan birokrasi publik, yaitu satu sebutan lain dari pemerintah, dan kebijaksanaan publik (atau kepentingan bersama antara pemerintah dan warga negara). Barang-barang dan jasa publik adalah salah satu konsep teoritis dalam ekonomi modern yang digunakan oleh ahli-ahli ilmu sosial lainnya. Salah Satu penerapan terpenting adalah pada pengorganisasian kepentingan ekonomi.

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (*personal service*) sampai jasa sebagai produk. Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Haksever *et al* (2000) dalam Sinambela (2006) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (*services*) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson *et al* (2005) dalam Sinambela (2006) jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam

kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.

Sinambela (2010, hal : 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotlern dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Iru dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis tujuan pelayanan

publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1. **Transparan**

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. **Akuntabilitas**

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Kondisional**

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. **Partisipatif**

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. **Kesamaan Hak**

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.

6. **Keseimbangan Hak Dan Kewajiban**

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah

kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti :

1. Kinerja (*performance*)
2. Keandalan (*reliability*)
3. Mudah dalam penggunaan (*easy of use*)
4. Estetika (*esthetics*), dan sebagainya

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Abidin (2010, hal : 71) mengatakan bahwa pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumen. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini berarti pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan.

Moch Ichsan (1998:22) menjelaskan bahwa ada beberapa substansi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi:

1. *Core skills*, pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki perangkat birokrasi baik menyangkut profesionalisme individu maupun kolektif untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan pasar secara kompetitif.
2. *technicians*, adalah kemampuan birokrat untuk menguasai aspek teknis secara professional di bidang pekerjaan sehingga menunjukkan kinerja yang penuh rasa tanggung jawab (responsibility).
3. *Management*: kemampuan birokrat untuk dapat mengelola pekerjaan secara professional baik menyangkut kinerja individual, kinerja tim maupun aspek managerial dan leadership.
4. *Skill*, ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur khususnya menyangkut bidang pekerjaannya, termasuk penyesuaian terhadap proses perubahan.
5. *Habits*, membiasakan bekerja secara profesional dengan tidak mengabaikan aspek etika dan moral sehingga akan tercipta kultur kinerja yang kondusif.
6. *Cohesion*, membiasakan bekerja secara sistemik atau keterpaduan antara berbagai komponen yang terlihat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
7. *Collective Experience*, menjadikan pengalaman individu atau kelompok tentang keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja sebagai pengalaman bersama.
8. *Knowledge of environment*, menyadari terjadinya perubahan setiap saat dalam suatu lingkungan sehingga pengetahuan tentang lingkungan untuk mengantisipasi perubahan sangat diperlukan.

9. *Technology*, diperlukan penguasaan teknologi sebagaimana persyaratan penting karena menguasai teknologi dapat diibaratkan menguasai dunia dan perubahan.

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. *Excelent Service* harus menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi di pemerintah daerah. Dunia usaha menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan pasti. Pemerintah perlu menyusun Standar Pelayanan bagi setiap institusi (Dinas) di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dinas yang mengeluarkan perizinan bagi pelaku bisnis. Perizinan berbagai sektor usaha harus didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus perizinan. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat.

Hasil penelitian tentang kualitas pelayanan yang perlu dijadikan pedoman oleh aparat pemda dalam melayani masyarakat yang merupakan hasil Studi International menyatakan bahwa tiga 3-6 dari 10 pelanggan akan bicara secara terbuka kepada umum mengenai perlakuan buruk yang mereka terima. Pada akhirnya 6 dari 10 pelanggan akan mengkonsumsi barang atau jasa alternatif (Pantius D, Soeling dalam Sutopo dan Sugianti, 1990, 11). Hasil *study The Technical Assistance Research Program Institute* menunjukkan:

- 95 % dari pelanggan yang dikecewakan tidak pernah mengeluh kepada perusahaan.
- Rata-rata pelanggan yang komplain akan memberitahukan kepada 9 atau 10, orang lain mengenai pelayanan buruk yang mereka terima.
- 70 % pelanggan yang komplain akan berbisnis kembali dengan perusahaan kalau keluhannya ditangani dengan cepat (Pantius D, Soeling dalam Sutopo dan Sugianti, 1990, 11).

Hasil studi tersebut mempertegas bahwa pelayanan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga loyalitas konsumen, demikian pula halnya pelayanan yang diberikan oleh pemda kepada para pelaku bisnis. Bila merasa tidak mendapat pelayanan yang memuaskan maka mereka akan dengan segera mencari daerah lain yang lebih kompetitif untuk memindahkan usahanya.

Penilaian Kualitas Pelayanan Konsumen menurut Zeithaml Para suraman Berry yang dikutip oleh Amy YS. Rahayu dalam Sugiarto (1999) adalah sebagai berikut.

1. *Tangibles*: kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan sebagainya.
2. *Reliability*: kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. *Responsiveness*: kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

4. *Assurance*: kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. *Emphaty*: sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

Pemberian pelayanan yang berkualitas memang menjadi suatu kewajiban pemerintah terhadap masyarakat, karena masyarakat dari segi penyelenggaraan pelayanan publik berposisi sebagai konsumen. Oleh karena itu, pemerintah harus menempatkan masyarakat/pelanggan sebagai raja. Hal ini sesuai pendapat Osborne and Plastrick (1997: 157) *putting the costumer in the driver's seat*. Sejalan dengan itu, Nurmandi (1999: 260) mengatakan bahwa upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat kota yang bersifat heterogen merupakan tugas yang paling rumit. Walaupun demikian, sesuai dengan fungsi dan tugasnya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pelayanan yang berkualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan (ISO 8402) tentang kualitas produk barang dan jasa. Dengan demikian, Gaspersz (1997: 5) menyatakan bahwa kualitas mengacu pada pengertian pokok sebagai berikut: (i) kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian, memberikan kepuasan atas penggunaan

produk itu; dan (ii) kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Selain itu, Salusu (1998: 469) mengatakan bahwa kualitas adalah penyesuaian terhadap persyaratan, yaitu persyaratan dari klien atau konsumen. Artinya bahwa produk maupun jasa yang diberikan lebih mengutamakan keinginan/kebutuhan pelanggan. Suatu produk atau jasa dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik serta diproduksi dengan cara yang baik dan benar. Karena kualitas pelayanan ditentukan oleh pelanggan maka ada baiknya kita ketahui definisi pelanggan. Freeport dan Maine dalam Gaspersz (1997: 33) memberikan beberapa definisi tentang pelanggan sebagai berikut:

- a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung padanya.
- b. Pelanggan adalah orang membawa kita pada keinginannya.
- c. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan.
- d. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan.

Berkaitan dengan itu, Sugianto (1999: 39) mengatakan bahwa mutu/kualitas dikatakan sangat baik apabila penyedia jasa memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan. Sedangkan mutu atau kualitas disebut baik apabila penyedia jasa memberikan pelayanan yang setara dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Sebaliknya mutu/kualitas disebut jelek jika pelanggan memperoleh pelayanan yang rendah dari harapannya. Kemudian Milind dan Jagdish dalam Gaspersz (1997: 29) bahwa kesetiaan pelanggan berkaitan erat dengan kepuasan terhadap produk.

Pelayanan menurut Sugiarto (1999: 36) adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang, dan lain-lain) pada tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani. Selanjutnya Munir (1998: 16-17) mengatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan.

Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang diberikan pemerintah. Karena tugas dan fungsi pemerintah salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah perlu memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima). Pelayanan prima menurut Sutopo dan Sugianti (LAN-RI: 1990) adalah pelayanan yang sangat baik atas pelayanan yang terbaik. Ditambahkan pula bahwa dalam pelayanan prima perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat maka pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan (masyarakat).
- b. Pelayanan prima bisa ada manakala ada standar pelayanan.
- c. Untuk instansi yang sudah memiliki standar pelayanan maka pelayanan prima adalah apabila pelayanan tersebut mendekati standarnya.
- d. Apabila pelayanan selama ini memenuhi standar pelayanan maka pelayanan prima berarti adanya terobosan baru, yaitu pelayanan yang melebihi standarnya.

- e. Untuk instansi yang belum memenuhi standar pelayanan maka pelayanan prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan. Usaha selanjutnya adalah menyusun standar pelayanan.

Pelayanan prima diberikan oleh segenap aparatur pemerintah agar aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (umum). Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI telah mengeluarkan pedoman tatalaksana pelayanan umum, dalam Sutopo dan Sugianti (1990: 13) yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan bagi instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pedoman itu menjelaskan bahwa pelayanan umum diatur dalam suatu tatalaksana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesederhanaan dalam arti prosedur/tatacara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. adanya kejelasan dan kepastian mengenai: (i) prosedur/tatacara pelayanan umum; (ii) persyaratan pelayanan umum baik teknis maupun administratif; (iii) unit kerja dan atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum; (iv) hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum; dan (v) pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
3. keamanan dalam arti proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum

4. keterbukaan dalam arti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian, rincian biaya dan hal-hal lain diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Efisiensi, artinya: (i) persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan; dan (ii) dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi terkait.
6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: (i) nilai barang dan atau jasa pelayanan umum tidak menuntut biaya tinggi diluar kewajiban; (ii) kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum; dan (iii) ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlukan secara adil.
8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

3. Faktor-faktor Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan merupakan tugas, kewajiban dan fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada rakyat. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Bryant and White (1982: 345) bahwa tugas

penting yang diletakan dipundak pemerintah daerah adalah menyelenggarakan penyampaian pelayanan di daerah.

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pasti memiliki rumusan misi, tujuan dan sasaran. Salusu (1998: 121), pernyataan misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan.

Setelah organisasi merumuskan misi organisasinya maka diturunkan ke dalam tujuan. Tujuan menurut Salusu (1998: 133) adalah kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif dan yang mungkin hanya sebagian yang dapat dicapai. Tujuan dari suatu organisasi perlu dirinci sehingga dapat diketahui kapan dan berapa sasarnya.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian misi dan tujuan organisasi, yakni sumber daya berupa *man, materials, machines, methods, money, and markets*. Berkaitan dengan itu, Bryant and White (1987: 346) menyatakan bahwa salah satu kelemahan pemerintah daerah adalah selalu bergantung pada pendanaan untuk mengadakan berbagai sarana dan prasarana pendukung termasuk manajemen. Dengan demikian, organisasi-organisasi teknis yang memberikan pelayanan juga mengalami kendala. Untuk itu, Munir (1998: 119) mengatakan bahwa fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain: (i) mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu; (ii) meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa; (iii) kualitas produk yang lebih baik/terjamin; (iv) ketepatan susunan dan stabilitas ukuran

terjamin; (v) lebih mudah/ sederhana dalam gerak para pelakunya; (vi) menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan; dan (vii) menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga mengurangi sifat emosional mereka.

Selanjutnya Lenvinne (1990), menjelaskan bahwa dimensi kualitas pelayanan terdiri atas: (1) *Responsiveness* atau *responsivitas* ini mengukur daya tanggap *providers* terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan *customers*; (2) *Responsibility* atau *responsibilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan; (3) *Accountability* atau *akuntabilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pendapat lain yang senada mengenai dimensi atau ukuran kualitas pelayanan dikemukakan oleh Tjiptono (1997, 14) dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Total Quality Service," yaitu: (1) Bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; (2) Keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan; (3) Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap; (4) Jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang dimiliki

para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan; dan (5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan

Dari beberapa teori tersebut diatas dapat di sintesis bahwa pelayanan adalah didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan serta terjadi interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan serta sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan, meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik dengan tetap memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, pemerataan dan keadilan.

3. Kebersihan

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.

Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri

maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi, menyikat gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih.

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara melap jendela dan perabot rumah tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan (misalnya dengan abu gosok), membersihkan kamar mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan halaman dan selokan, dan membersihkan jalan di depan rumah dari sampah. Tingkat kebersihan berbeda-beda menurut tempat dan kegiatan yang dilakukan manusia. Kebersihan di rumah berbeda dengan kebersihan kamar bedah di rumah sakit, sedangkan kebersihan di pabrik makanan berbeda dengan kebersihan di pabrik semikonduktor yang bebas debu.

Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya, debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat.

Problem tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan hal kebersihan lingkungan. Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik. Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan dan penyakit lain yang disebabkan

air dan udara sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Berbagai upaya pengembangan kesehatan anak secara umum pun menjadi terhambat.

Sonny Keraf menerapkan 8 Prinsip-prinsip Etika Lingkungan sebagai pegangan dan tuntunan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, yaitu :

1. Sikap Hormat terhadap Alam

Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya

2. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan isinya.

3. Prinsip Solidaritas

Yaitu prinsip yang membangkitkan rasa solidier, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan.

4. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian

Prinsip satu arah, menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk alam.

5. Prinsip “No Harm”

Yaitu Tidak Merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu

6. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam

Ini berarti , pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai obyek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia.

7. Prinsip Keadilan

Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari.

8. Prinsip Demokrasi

Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbeaan keanekaragaman sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan didalam menentukan baik-buruknya, rusak-tidaknya, suatu sumber daya alam.

9. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam.

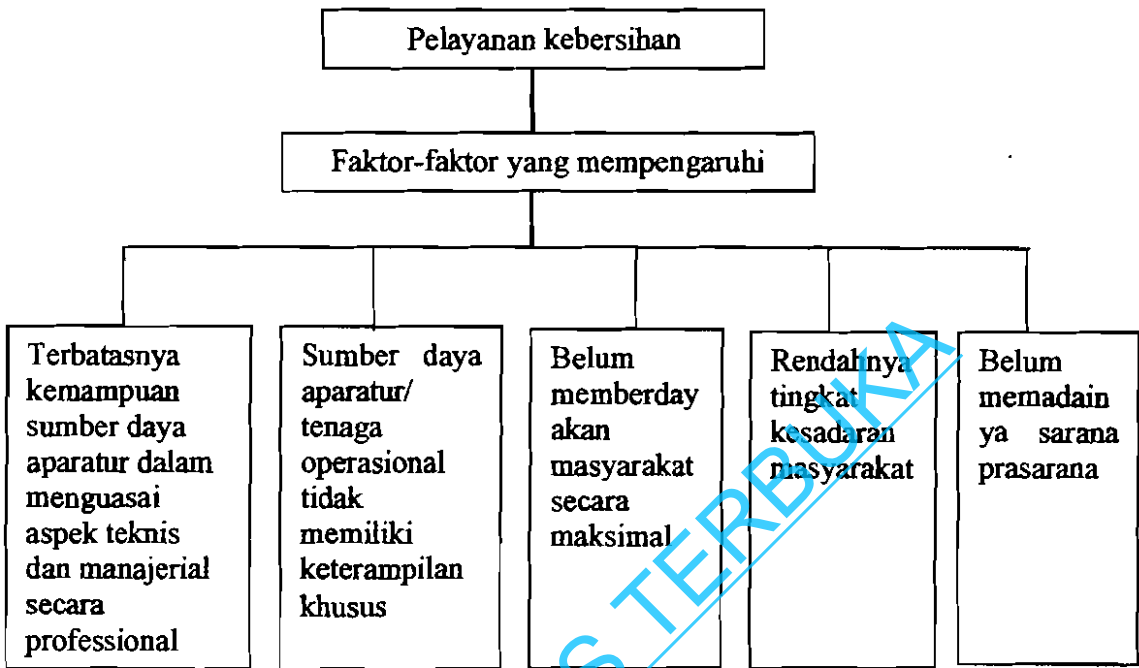
Dari beberapa teori di atas maka dapat disintesis bahwa kebersihan adalah Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higiene yang baik mulai dari kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum, keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, virus, bakteri patogen dan bau atau infeksi disebabkan oleh mikroba

B. Kerangka Pemikiran

Dari beberapa teori yang menjelaskan tentang pelayanan dan kebersihan yang dikemukakan dalam kajian pustaka, maka dapat disintesis bahwa pelayanan kebersihan adalah didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terstruktur, terpola dan sistematis serta terjadi interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dalam menyediakan kepuasan pelanggan untuk menciptakan keadaan hygiene yang baik mulai dari kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum, keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, virus, bakteri patogen dan bau atau infeksi disebabkan oleh mikroba.

Berdasarkan penjelasan atau teori para ahli dalam kajian pustaka, maka kerangka Pemikiran tentang pelayanan kebersihan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dibuatkan sketsa sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bermaksud memberi gambaran dan penjelasan detail mengenai (i) faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan kebersihan yang dilakukan kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan pekuburan umum dalam mendukung sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan pembangunan kabupaten Wakatobi; dan (ii) peranan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi dalam mendukung berbagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten Wakatobi, khususnya kualitas pelayanan kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan sebagaimana disebutkan pada BAB 1 dalam tesis ini. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Strauss and Corbin (1990: 19) bahwa *qualitative method can be used to uncover and understand what lies behind any phenomenon about which little is yet known... qualitative method can give the intricate details of phenomena that are difficult to convey with quantitative method* (penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memahami apa yang tersembunyi dari sebuah fenomena, sesuatu yang belum diketahui dengan baik. Metode kualitatif dapat menunjukkan beberapa langkah-langkah yang kongkrit dari suatu fenomena yang sulit dipecahkan melalui metode kuantitatif).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wakatobi Pulau Wangi-Wangi sebagai daerah ibukota kabupaten. Alasan pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah daerah ibukota kabupaten yang merupakan pintu masuk pariwisata Wakatobi. Di samping itu, pemilihan ibukota kabupaten sebagai lokasi utama dalam pengambilan data dalam penelitian ini adalah karena aktivitas masyarakat di pulau ini cukup tinggi dan dihuni oleh masyarakat dari tiga pulau lainnya yang ada di Wakatobi dan cenderung perilakunya terhadap pemeliharaan lingkungan masih relatif sama.

C. Informan penelitian

Adapun mereka yang ditunjuk sebagai informan penelitian adalah orang yang diduga dapat mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti, antara lain:

- a. Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum
- b. Kepala seksi Kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum kabupaten Wakatobi
- c. Koordinator angkutan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum kabupaten Wakatobi
- d. Pemegang Barang pada Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum kabupaten Wakatobi
- e. Kasubag TU Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum kabupaten Wakatobi

f. Pegawai harian lepas kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum kabupaten Wakatobi

g. Masyarakat/pelanggan

Khusus untuk masyarakat/pelanggan, yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini diambil secara acak pada setiap wilayah pelayanan kebersihan. Informan penelitian ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbentuk wawancara. Untuk kelengkapan data dan terarahnya pertanyaan yang diajukan, maka peneliti dalam kegiatan wawancara menggunakan pedoman wawancara guna memperoleh data yang lebih mendalam dari informan kunci (*key informan*). Penetapan informan kunci ini didasarkan atas kenyataan yang bersangkutan mengetahui, memahami dan mampu memberikan jawaban mengenai berbagai hal yang menyangkut penelitian ini. Di samping itu, sebagai data tambahan (data sekunder), peneliti akan melihat data-data lain dalam bentuk dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para responden di lokasi penelitian melalui wawancara lapangan dan observasi.
- b. Data sekunder, yakni data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang didapat berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, literatur, dan laporan-laporan penelitian.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Profil kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum, meliputi keadaan personil, keadaan anggaran, struktur organisasi, tupoksi, visi dan misi, dan sarana prasarana pendukung.
- 2) Pelaksanaan tugas Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum, yang meliputi (a) peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum; (b) kedudukan, tugas, kewajiban, dan fungsi kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum.
- 3) Kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum, yang meliputi: (a) ketepatan jadwal pengangkutan sampah, (b) ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara dan jangkauannya; (c) keterangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); (d) kesesuaian besarnya tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan; (e) ketersediaan lahan pertamanan, pekuburan umum; dan (f) ketersediaan peralatan atau perlengkapan untuk melaksanakan program pertamanan, pemadam kebakaran, dan pekuburan umum.
- 4) Faktor-faktor yang akan mempengaruhi pelayanan kebersihan pada kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan, khususnya data primer dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yakni suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau menggali informasi lebih jauh mengenai hal-hal yang berhubungan permasalahan dalam penelitian ini yang meliputi peran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pedoman wawancara)

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengujian/Analisis keabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Istilah triangulasi pertama kali dipergunakan oleh Denzin Creswell (1994:174) : *the term triangulation, a term borrowed from navigation and military strategy, to argue for the combination of methodologies in the study of the same phenomenon*. Selanjutnya Jick dalam Creswell (1994) mengatakan : *the concept of triangulation was based on the assumption that any bias inherent in particular data sources, investigator and method would be neutralized when used in conjunction with other data sources, investigator and method*. Kemudian Moleong (1997:178) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Patton (1987:178) dalam Moleong

mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

G. Teknik Penafsiran Data

Penafsiran data dilakukan dengan kategori yang telah ditetapkan. Data yang telah dikumpul dihubungkan dan diuji dengan kategori yang telah ditetapkan. Selanjutnya dapat ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan teori yang ada.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Pada temuan penelitian ini akan dibahas mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian, yaitu mengenai Letak Geografis Kabupaten Wakatobi sebagai subyek penelitian; kondisi umum Kabupaten Wakatobi; dan deskripsi data yang diperoleh dari wawancara langsung.

1. Kondisi Geografis

1.1. Letak Geografis Kabupaten Wakatobi

Kabupaten Wakatobi terletak di kepulauan Jazirah Tenggara pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Propinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 5.000 – 6.250 Lintang Selatan (sepanjang ± 160 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara 123.340 - 124.640 Bujur Timur (sepanjang ± 120 km).

Kabupaten Wakatobi di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, di sebelah Selatan dengan Laut Flores, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buton.

1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Wakatobi memiliki luas wilayah daratan ± 823 km² atau hanya sekitar 4,5 persen dari total wilayah Kabupaten Wakatobi secara keseluruhan. Sisanya merupakan wilayah perairan laut yang luasnya mencapai ± 18.377 km². Kabupaten

Wakatobi terdiri dari 8 wilayah kecamatan yang semuanya berada di wilayah kepulauan (43 pulau) yaitu :

- a. Kecamatan Binongko
- b. Kecamatan Togo Binongko
- c. Kecamatan Tomia
- d. Kecamatan Tomia Timur
- e. Kecamatan Kaledupa
- f. Kecamatan Kaledupa Selatan
- g. Kecamatan Wangi-Wangi
- h. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241,98 km² atau 29,40 % terhadap total luas wilayah Kabupaten Wakatobi, Wangi-Wangi Selatan 206,02 km², Binongko 93,10 km², Togo Binongko 62,90 km², Tomia 47,10 km², Tomia Timur 67,90 km², Kaledupa Selatan 58,50 km² dan Kecamatan Kaledupa 45,50 km², atau 5,53 % dari total luas wilayah Kabupaten Wakatobi.

Seiring dengan perubahan politik nasional yang menekankan otonomi dan desentralisasi kewenangan, Wakatobi berdiri sebagai daerah otonom baru melalui UU No 29/2003 (tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara). Kondisi ini tentunya akan menempatkan Wakatobi sebagai daerah otonom sekaligus daerah konservasi laut

[illegible]

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Wakatobi

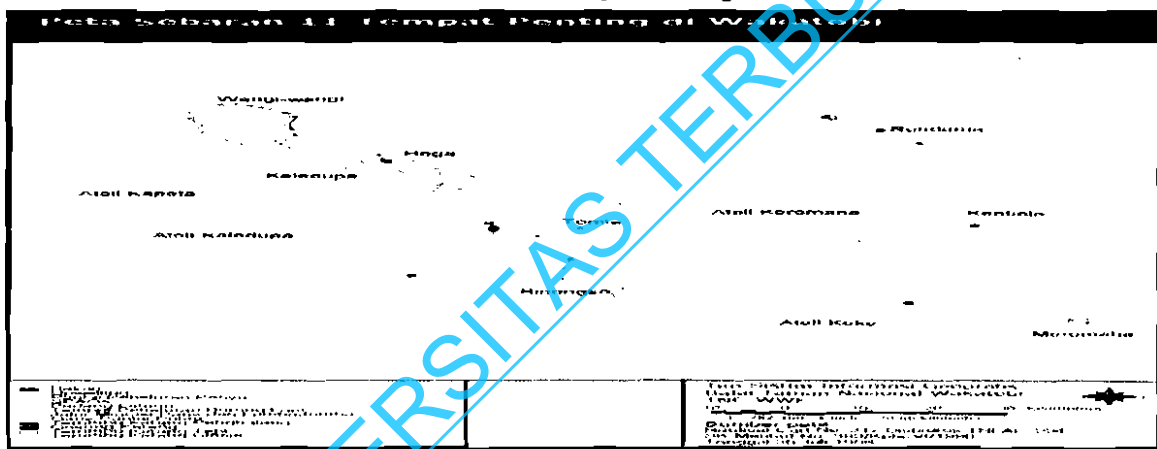
Wakatobi terdapat pada Pusat Segi Tiga Karang Dunia (*Coral Tri-angle Center*), memiliki jumlah keanekaragaman hayati kelautan tertinggi didunia yakni 750 jenis karang dari 850 spesies karang dunia, 900 jenis ikan dunia dengan 46 dive sites teridentifikasi (salah satunya Marimabok). Wakatobi memiliki 90.000 ha terumbu karang dan Atol Kaledupa (48 km) atol tunggal terpanjang di dunia (Operation Wallacea, 2006)



Gambar 4.2. Peta Posisi Pusat Segi Tiga Karang Dunia

Terdapat 11 sumberdaya penting yang perlu dikelola sebagai modal pembangunan Kabupaten Wakatobi yakni Terumbu Karang Cincin (*atoll reef*), Terumbu Karang Tepi (*fringing reef*), Terumbu Karang Penghalang (*barrier reef*), Gosong Karang (*patch reef*), Bakau (*mangrove*), Daerah pemijahan ikan (*SPAGs*), Padang Lamun (*Seagrass*), Daerah *upwelling*, Tempat bertelur burung pantai, Daerah terlihatnya paus & lumba-lumba (*cetacean*) dan Pantai Peneluran Penyu (BTNW-TNC/WWF, 2006). Penyebaran sumberdaya penting tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.3. Peta Sebaran 11 Sumberdaya Penting di Wakatobi



Kabupaten Wakatobi merupakan gugusan *pulau-pulau kecil* bahkan dapat dikatakan *gugusan pulau sangat kecil*, berjumlah 48 buah. Luas Kabupaten Wakatobi adalah 13.990 km², terdiri atas luas daratan 457 km² dan luas perairan 13.533 km² dan keliling 327 km. Luas masing-masing gugus pulau disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Luas masing-masing pulau di Kabupaten Wakatobi

No.	Nama Pulau	Luas dalam (Ha)	Luas dalam (km ²)	Keliling (Km)
1	Anano	39,1	0,4	2,4
2	Binongko	9.796,7	98,0	50,1
3	Cowo-Cowo	23,0	0,2	1,8
4	Hoga	440,1	4,4	10,4
5	Kaledupa	6.925,2	69,3	49,6
6	Kampenanune	1.513,9	15,1	15,6
7	Kapetana	1.913,6	19,1	23,6
8	Kantiole	14,3	0,1	1,7
9	Lintea Selatan	802,6	8,0	12,6
10	Lintea Utara	1.631,6	16,3	18,7
11	Moromaho	217,3	2,2	7,5
12	Ndaa	4,6	0,0	0,8
13	Runduma	521,8	5,2	10,0
14	Sumanga	124,8	1,2	4,7
15	Tengah	48,5	0,5	2,6
16	Tiga	3,3	0,0	0,7
17	Timor	125,0	1,3	4,3
18	Tokobao	22,0	0,2	2,0
19	Tolandona	390,1	3,9	10,1
20	Tomia	5.413,1	54,1	31,1
21	Wangi-Wangi	15.385,8	152,9	48,2
22	Derawa	397,7	3,8	18,3
	Luas Total Darat	45.736	457	327
	Luas Laut	1.353.269	13533	
	Total	1.399.004	13.990	

Dari tabel 4.1. tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Wakatobi sebagian besar terdiri dari perairan laut yakni sekitar 97%, sedangkan luas daratnya hanya mencapai 3 %.

1.2. Keadaan Iklim

Keadaan musim di Kabupaten Wakatobi pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana mempunyai 2 musim yakni musim hujan dan musim

kemarau. Musim hujan tahun 2008 terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April, pada saat tersebut angin Barat yang bertiup dari Benua Asia dan lautan Pasifik yang mengandung banyak uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin Timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung air. Khususnya pada bulan April dan Mei di daerah Kabupaten Wakatobi arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal dengan musim Pancaroba.

Berdasarkan data dari BPS Wakatobidalam angka tahun 2008 bahwa curah hujan yang dibawah normal terjadi di bulan Agustus yaitu di Kel. Waha Kec. Tomia kurang dari 9 mm dibawah curah hujan normal yaitu 9 – 13 mm, sedangkan di Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi kurang dari 27 mm dibawah curah hujan normal yaitu 27 – 37 mm. sedangkan untuk bulan-bulan selain Agustus curah hujan relatif normal.

Sebagai wilayah yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan, pengaruh musim juga sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Tingginya gelombang laut dan ombak yang keras akibat pengaruh musim timur dan musim barat, menjadi hambatan bagi masyarakat. Puncaknya biasa terjadi pada bulan Juli-Agustus. Sehingga, pada bulan-bulan tersebut biasanya transportasi antar pulau sering mengalami keterlambatan.

Tinggi rendahnya suhu udara pada suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh posisi dan ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut. Makin tinggi posisi suatu tempat dari permukaan laut akan semakin rendah suhu udara dan sebaliknya. Karena wilayah daratan Kabupaten Wakatobi mempunyai ketinggian umumnya di

bawah 1000 meter dari permukaan laut dan berada disekitar daerah khatulistiwa, sehingga daerah ini bersuhu panas.

1.3. Keadaan Air

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air minum di Kabupaten Wakatobi sudah terpenuhi oleh perusahaan air minum. Dari 9 perusahaan air minum yang terdapat di Wakatobi, hampir terdistribusi ke seluruh kecamatan, kecuali kecamatan Binongko dan Tomia yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perusahaan air minum di kedua kecamatan tersebut.

Keberadaan 9 perusahaan air minum tersebut menyerap tenaga kerja operasional sebanyak 19 orang atau dengan kata lain satu perusahaan air minum menyerap 2 orang tenaga kerja operasional. Sementara tenaga kerja lainnya yang terserap sebanyak 6 orang.

Jumlah pelanggan air minum pada tahun 2008 sebanyak 1.823 pelanggan. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan hampir dua kali lipat dari tahun 2007 yang berjumlah 953 pelanggan. Pelanggan air minum ini didominasi oleh pelanggan kategori Rumah Tempat Tinggal sebanyak 1.764 pelanggan pada tahun 2008. Dominasi yang sama terjadi pada tahun 2007. Jika dicermati lebih lanjut, kenaikan jumlah pelanggan air minum secara keseluruhan mempunyai pola yang sama dengan kenaikan pada pelanggan kategori Rumah Tempat Tinggal.

1.4. Keadaan Tanah

Sebagian besar lahan produktif di kabupaten Wakatobi diusahakan untuk pertanian. Dari keseluruhan lahan yang terdapat di Wakatobi, sebanyak 33,62% digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/kebun, ladang/huma, tambak,

kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat, perkebunan rakyat.

Bila dirinci menurut penggunaannya tahun 2008, maka yang paling luas adalah lahan yang digunakan untuk keperluan lain-lain yakni seluas yaitu 34.117,34 ha (43,61%), kemudian lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 9.512 ha (12,16%), perkebunan rakyat seluas 9.069 ha (11,59%), dan tegal/kebun seluas 8.793 ha (11,24%). Penggunaan lahan untuk ladang/huma merupakan penggunaan lahan yang terkecil yakni hanya seluas 670 ha (0,86%). Sumber data dari wakatobi dalam angka tahun 2008

2. Kondisi Demografi

2.1. Penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan; seperti besarnya jumlah penduduk Wakatobi dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Kabupaten Wakatobi.

Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah kependudukan termasuk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dilakukan pemerintah melalui berbagai program keluarga berencana (KB). Begitu pula usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk dengan diberlakukannya otonomi daerah yang diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk.

2.1.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk tahun 2005 yang disajikan pada table 3.1.1 merupakan angka hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005. Sedangkan data penduduk tahun 2007 dan 2008 adalah angka estimasi berdasarkan proyeksi hasil SUPAS 2005.

Jumlah penduduk pada tahun 2005 adalah sebesar 95.574 jiwa dan meningkat menjadi 99.492 jiwa pada tahun 2007 dan 101.475 pada tahun 2008. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang cukup cepat sejak tahun 1990, yaitu dari 2,30 persen selama periode 1990-2000 menjadi 1,70 persen per tahun selama periode 2000-2005. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2007 sebesar 1,34 persen, sedangkan tahun 2008 sebesar 1,99 persen dibanding tahun sebelumnya

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008

NO	(TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	1990	32.648	37.098	69.746
	1991	34.465	37.573	72.038
	1992	34.623	37.669	72.292
	1993	34.766	37.948	72.714
	1994	35.133	38.156	73.289
	1995	35.329	38.283	73.612
	1996	37.427	39.544	76.971
	1997	37.335	39.848	77.183
	1998	38.188	40.589	78.777
	1999	42.719	44.076	86.795
	2000	42.620	45.173	87.793
	2001	42.984	45.525	88.509
	2002	43.563	45.679	89.242
	2003	44.843	46.654	91.497
	2004	44.636	47.869	92.505
	2005	44.282	51.292	95.574
	2006	47.599	50.581	98.180
	2007	48.199	51.293	99.492
	2008	49.259	52.216	101.4750

Sumber : Wakatobi Dalam Angka, 2009

2.2. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di tanah air merupakan suatu hal yang penting yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Semakin bertambah jumlah penduduk menjadikan jumlah angkatan kerja kian meningkat. Manakala tingginya angkatan kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, dengan kata lain mereka tidak dapat tertampung dalam pasar tenaga kerja maka akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan peranan penduduk dalam kegiatan ekonomi produktif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menyatakan banyaknya penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar kerja dari setiap 100 penduduk usia kerja.

Penduduk usia 15 tahun keatas bila ditinjau dari segi ketenagakerjaan merupakan penduduk usia kerja. Pada tahun 2008, penduduk usia kerja sebanyak 71.690 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 34.150 jiwa (47,64%) dan perempuan sebanyak 37.540 jiwa (52,36%).

Dari penduduk usia kerja tersebut diatas terdapat angkatan kerja sebesar 50.697 jiwa. Angkatan kerja ini terdiri dari 48.018 jiwa (66,98 % dari penduduk usia kerja) penduduk yang bekerja dan 5,28 % penduduk yang menganggur. Penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 20.993 jiwa atau 29,28 persen terhadap usia kerja. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri dari bersekolah 6.774 jiwa (9,45 %), mengurus rumah tangga 9.935 jiwa (13,86 %) dan lainnya sebesar 4.284 jiwa (5,98%).

Seperti diketahui bahwa tidak semua penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja normal (35 jam ke atas dalam seminggu). Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu adalah 41,47 persen atau sekitar 15,520 orang, dan sekitar 5,026 orang diantaranya bekerja kurang dari 15 jam dalam seminggu. Biasanya para pekerja yang bekerja separuh waktu tersebut adalah pekerja yang bekerja pada sektor informal.

3. Kondisi Perekonomian

3.1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 masih didominasi oleh sektor pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan). Peranan sektor pertanian pada pembentukan PDRB Kabupaten Wakatobi berfluktuasi yaitu 41,44% tahun 2003, 41,21 % tahun 2004 dan 51,91%

pada tahun 2005. Peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wakatobi secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.3, sebagai berikut:

Tabel 4.3. Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Wakatobi terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku, 2003-2005 (%)

Sektor	Tahun		
	2003	2004	2005
1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	41,44	41,21	51,91
2. Pertambangan dan penggalian	3,37	3,39	2,81
3. Industri Pengolahan	3,82	3,90	2,86
4. Listrik dan Air Bersih	2,82	3,51	2,93
5. Konstruksi/bangunan	3,93	3,77	3,37
6. Perdagangan, hotel dan restoran	18,16	17,90	13,40
7. Pengangkutan dan komunikasi	2,05	2,11	2,00
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	4,77	5,44	5,45
9. Jasa-jasa	19,64	18,77	15,27
J u m l a h	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi, 2006

Pada Tabel 4.3. terlihat bahwa sektor dominan penyusun PDRB adalah Sektor Pertanian yang mempunyai kontribusi 51,91% pada tahun 2005. Selanjutnya sektor jasa-jasa (15,27%), Perdagangan, Hotel, dan Restoran (13,40%), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (5,45%), Kontruksi/Bangunan (3,37%), Listrik, Gas dan Air Minum (2,93%). Industri Pengolahan (2,86%), Pertambangan dan Penggalian (2,81%), , dan Sektor yang memberikan kontribusi paling rendah adalah Angkutan dan Komunikasi (2,00%)

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi ditunjukkan oleh kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000.

PDRB Kabupaten Wakatobi atas dasar harga konstan tahun 2003 sebesar Rp. 151.872,57 juta, pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 161.433,20 juta dan selanjutnya pada tahun 2005 mencapai Rp. 174.158,95 juta atau tumbuh sebesar 6,30 % tahun 2004 dan 7,88% tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2005 didukung oleh pertumbuhan sektornya yang seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan sektor tertinggi adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yakni sebesar 28,06% diikuti oleh sektor listrik dan air bersih sebesar 27,31%, sektor konstruksi/bangunan (19,14%), sektor pengangkutan dan komunikasi (15,32%), sektor pertambangan/penggalan (10,26%), sektor industri pengolahan (7,57%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (6,51%), sektor jasa-jasa (5,95%) dan sektor yang mempunyai pertumbuhan yang paling rendah adalah sektor pertanian (3,53%).

3.3. PDRB Per Kapita

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB per kapita. Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita penduduk Kabupaten Wakatobi dari tahun 2003 hingga 2005 memperlihatkan kecenderungan meningkat. PDRB per kapita pada tahun 2003 sebesar Rp. 2.194.453,27 dan pada tahun 2005 telah mencapai Rp. 3.741.112,56 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 23,49%. Sedangkan berdasarkan harga konstan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 3,81% yaitu Rp. 1.636.293,40 pada tahun 2003 dan pada tahun 2005 telah mencapai Rp. 1.823.424,78.

Tabel 4.4.

PDRB Per Kapita Kabupaten Wakatobi, 2003-2005 (Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan 2000
2003	2.194.453,27	1.636.293,40
2004	2.518.584,96	1.735.691,53
2005	3.741.112,56	1.823.424,78

Sumber : PDRB Kabupaten Wakatobi, 2006

Berdasarkan harga konstan dan harga berlaku pada tabel di atas maka tingkat inflasi di Kabupaten Wakatobi masih dapat dikendalikan bi bawah satu digit yaitu atau rata-rata per bulan. Tingkat inflasi ini akan terus dipertahankan selama lima tahun ke depan sehingga daya beli masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok stabil.

4. Kondisi Sosial Budaya

4.1. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap warga Negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Pendidikan merupakan pembentuk watak bangsa di segala bidang kehidupan, khususnya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam pembangunan dan ekonomi.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas-fasilitas dan tenaga pendidik dari berbagai bidang ilmu pengetahuan,dengan

tersedianya fasilitas pendidikan dan para pendidik yang berkualitas, diharapkan setiap warga dapat menikmati pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil survei social ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005, jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi usia 10 tahun ke atas sekitar 73.516 jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 41.98 persen yang tidak memiliki ijazah dengan kata lain penduduk tersebut tidak berhasil menamatkan pelajaran pada suatu jenjang pendidikan formal, baik dari sekolah swasta maupun negeri. Dari empat jenjang pendidikan formal yang dibahas disini, terlihat bahwa persentase kepemilikan ijazah terbesar adalah pada tingkat pendidikan sekolah dasar. (SD dan MI).

Persentase penduduk Kabupaten Wakatobi yang berhasil memperoleh ijazah SD adalah sekitar 28.45 persen, sedangkan yang mendapat ijazah SLTP sekitar 17,66 persen. Sementara warga yang sempat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang menengah atas yaitu sekitar 9,81 persen.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tingkat pendidikan dapat tercermin dari rendahnya persentase penduduk yang telah mendapatkan ijazah pada jenjang pendidikan di atas SLTA. Persentase penduduk yang mendapat ijazah Diploma I keatas sekitar 2,10 persen, yang terdiri dari tamat DI, DII dan DIII sekitar 0,95 persen, sedangkan yang berhasil menamatkan pendidikan sampai dengan S1 dan S2 sekitar 1,15 persen seperti digambarkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Kab. Wakatobi Menurut Ijazah Yang Ditamatkan Tahun 2005.

Pendidikan yang ditamatkan	Kabupaten Wakatobi	Prov. Sultra
Tidak Tamat SD	41,98	29,66
SD	28,45	30,11
SLTP	17,66	17,99
SLTA	9,81	17,81
DI/II/III	0,95	1,88
DIV/S1/S2	1,15	2,55
Jumlah	100,0 (73,516)	100,0 (1.485.513)

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas 2005.

Salah satu cermin pemerataan akses pendidikan dasar, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan hasil Susenas tahun 2005, APS 7-12 tahun Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 95,08 persen. Sementara APS usia 13-15 tahun adalah sekitar 90,79 persen dan APS usia 16-18 tahun adalah 57,62 persen. Dengan melihat angka APS Kabupaten Wakatobi pada anak usia SD yang sudah lebih dari 95 persen dapat diartikan bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah menikmati pendidikan dasar.

Tabel 4.6. Angka Patisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wakatobi Tahun 2005

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Prosentase
7-12	96,03	94,03	95,08
13-15	87,14	80,56	90,79
16-18	49,27	65,25	57,62

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2005

Berbeda dengan APS, Angka Partisipasi Murni (APM) biasanya lebih kecil dari angka APS. Karena angka tersebut benar-benar melihat persentase anak yang

masuk sekolah SMP pada usia 13-15 tahun dan yang bersekolah di SLTA pada kelompok usia 16-18 tahun.

Tabel berikut menggambarkan nilai APM pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Wakatobi. APM tingkat SD sebesar 90,23 persen, artinya ada sekitar 90,23 persen anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD. Sementara APM SLTP dan SLTA masing-masing sekitar 67,12 persen dan 39,29 persen.

Hal ini memperlihatkan bahwa yang bersekolah tepat pada usia sekolah sesuai jenjangnya hanya pada jenjang SD. Sementara pada jenjang yang lebih tinggi masih terdapat anak usia sekolah pada jenjang tersebut tetapi bersekolah pada jenjang yang lain.

Tabel 4.7. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wakatobi Tahun 2005

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
SD	91,40	88,95	90,23
SLTP	59,72	72,68	67,12
SLTA	29,84	45,67	39,29

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas 2005

Seperti diketahui bahwa salah satu indikator output penting dari pendidikan adalah angka melek huruf dewasa dan rata-rata lama sekolah. Monitoring pencapaian pendidikan antara lain dapat dilihat dari angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun lebih dari 95 persen, dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa lebih dari 7 tahun atau minimal tamat SD.

Hasil Susenas 2005 menunjukkan bahwa angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Wakatobi masih perlu terus ditingkatkan dengan meningkat angka melek huruf penduduk dewasa hingga melebihi angka 95 persen.

Tabel 2.6, menunjukkan bahwa bila dilihat dari kelompok umur, ternyata pada usia penduduk di atas 25 tahun, angka buta huruf mulai membesar, dan pada kelompok usia yang lebih tinggi presentase buta huruf semakin tinggi. Persentase penduduk yang buta huruf pada kelompok usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun masih berada dibawah 5 persen. Pada kelompok umur 25-34 tahun 8,11 persen, selanjutnya pada penduduk usia 35-49 tahun presentase yang buta huruf meningkat menjadi yaitu 10,29 persen,dan puncak tingginya persentase buta huruf terjadi pada kelompok usia di atas 50 tahun yaitu 39,96 persen.

Tabel 4.8. Persentase Penduduk Yang Melek dan Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wakatobi Tahun 2005

Kelompok Umur (tahun)	Melek Huruf (%)	Buta Huruf (%)
15-19	95,76	4,24
20-24	98,45	1,55
25-34	91,89	8,11
34-49	89,71	10,29
50 +	60,04	39,96
Rata-rata	87,17	12,83

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas 2005

Tingginya angka buta huruf pada usia di atas 50 tahun merupakan suatu hal yang dapat dipahami, mengingat pada masa lalu kesadaran akan pentingnya pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan yang belum begitu baik. Tetapi bila

pada usia produktif banyak yang buta huruf, hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi masih relatif rendah.

4.2. Kesehatan

Kondisi sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis di Kabupaten Wakatobi tahun 2005, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9. Keadaan Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten Wakatobi Tahun 2006

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Tenaga Medis	Satuan	Jumlah
1	Rumah Sakit	unit	1
2	Puskesmas	unit	10
3	Pustu	unit	23
4	Dokter Umum	orang	6
5	Bidan	orang	39
6	Perawat	orang	154
7	Tenaga Gizi	orang	21
8	Analisis Kimia	orang	1
9	Tenaga Farmasi	orang	10
10	Apoteker	orang	1

Sumber : Dinkes dan KB Kabupaten Wakatobi, 2006

4.3. Budaya dan Agama

Pemahaman kebudayaan suatu masyarakat sebagai alat perjuangan dan pembangunan, maka pemahaman terhadap kondisi lingkungan secara terpadu dan komprehensif merupakan suatu keniscayaan dengan menjadikan kebudayaan yang sudah ada sebagai indikator dan pondasi utama pembangunan. Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah posisi geografis, kondisi biososial, dan dinamika demografis. Kemudian membentuk gagasan, perilaku sosial dan simbol peradaban masyarakat

yang telah mengalami interaksi dan penyesuaian dalam waktu yang lama, yaitu sejak sekelompok masyarakat mulai menghuni daratan di Pulau-Pulau tersebut.

Dalam stratifikasi masyarakat Buton, masyarakat Wakatobi dipengaruhi oleh sistem stratifikasi sosial yang berlaku di Buton, yakni terdapat empat (4) lapisan sosial, yaitu golongan *kaomu* (bangsawan), *Walaka* (*maradika*=orang merdeka), *Papara* (penduduk desa) dan *batua* (budak). Dalam masyarakat Wakatobi peristilahan dan jumlah tingkatan itu berbeda-beda, tergantung sejauhmana hubungan interdependensi dengan kesultanan Buton pada masa silam. Karena masyarakat Wakatobi merupakan sub-kultur dari kebudayaan Buton, beberapa peristilahan pun ada yang mengalami pergeseran dalam stratifikasi sosial menjadi lebih luas.

Kebudayaan masyarakat Wakatobi tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekologi wilayah sebagai masyarakat pulau-pulau kecil. Dengan latar belakang kepulauan dan tekanan penduduk yang tinggi dari waktu-kewaktu menyebabkan pola kehidupan masyarakat sebagian mulai bergeser dari sektor pertanian ke aktifitas ekonomi dan migrasi yang bertumpu pada laut dan pesisir.

Masyarakat Wakatobi sangat terbuka dalam berinteraksi dengan berbagai suku bangsa lainnya. Hal ini didukung oleh kultur budayanya sebagai masyarakat maritim. Tingginya mobilitas penduduk dalam melakukan aktivitas perdagangan, di berbagai penjuru nusantara dan negara tetangga seperti Malaysia, dan Singapura telah ikut membentuk kultur sosial budaya masyarakat Wakatobi.

Sebagai bagian dari Kesultanan Buton di masa lampau, struktur masyarakat dan agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi adalah agama Islam. Hingga tahun 2003, jumlah tempat ibadah (agama Islam) masing-masing adalah

mesjid sebanyak 112 unit, Mushalah sebanyak 22 unit, sedangkan untuk Gereja, Pura dan Vihara belum ada di Wakatobi, ini disebabkan penduduk Wakatobi (yang menetap) 100% menganut agama Islam, sedangkan yang menganut agama lainnya (bilamana ada) adalah pendatang.

Terdapat 8 suku bangsa yang mendiami wilayah Kabupaten Wakatobi. Dari total penduduk 107,793 jiwa pada tahun 2006, maka suku bangsa terbanyak adalah Wakatobi (91,33%), suku bajo (6%) dan sisanya adalah jawa, bugis-makasar, eksodus dari Maluku/Timur-Timur, Wolio, Tolaki, Muna dan lain-lain.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pendidikan di Kabupaten Wakatobi dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Upaya meningkatkan mutu pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan manusia yang beriman, bertaqwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berilmu pengetahuan. Sedangkan usaha perluasan wajib belajar dimaksudkan agar pendidikan usia sekolah yang tiap tahun meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk itu sendiri.

Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2003 adalah sebanyak 22 unit yang tersebar di lima kecamatan. Sementara itu jumlah guru ada sebanyak 47 orang, sedangkan jumlah murid sebanyak 989 orang. Pada tahun 2003 rasio antara guru terhadap sekolah rata-rata 2 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 45 orang dan murid terhadap guru rata-rata 21 orang.

Dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar tercatat jumlah sekolah pada tahun 2003 sebanyak 101 unit. Jumlah guru sebanyak 684 orang, sedangkan jumlah murid sebanyak 14.742 orang. Rasio di tingkat SD pada tahun 2003 antara guru terhadap sekolah tercatat dengan rata-rata 7 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 145 orang dan murid terhadap sekolah rata-rata 22 orang.

Pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdapat 16 unit sekolah pada tahun 2003, sedangkan jumlah guru dan murid masing-masing ada sebanyak 235 dan 4.287 orang. Sehingga rasio antara guru terhadap sekolah tercatat dengan rata-rata 15 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 268 orang dan murid terhadap guru rata-rata 18 orang.

Jumlah Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) tahun 2003 terdapat 4 unit sekolah. Jumlah guru pada tahun 2003 ada sebanyak 93 orang, dan jumlah murid ada sebanyak 2.212 orang. Rasio yang tercatat pada tahun 2003 antara guru terhadap sekolah dengan rata-rata 23 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 553 orang dan murid terhadap guru rata-rata 24 orang.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Wakatobi dititikberatkan pada peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. Demikian pula pelaksanaan Program Nasional Keluarga Berencana (KB) Nasional diarahkan untuk menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas baik bidang kesehatan maupun KB maka selama tahun 2003 telah giat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan KB secara menyeluruh di setiap kecamatan sampai ke desa-

desa. Sampai tahun 2003 belum ada Rumah Sakit Umum dan hanya terdapat 7 unit Puskesmas Perawatan dan 12 unit Puskesmas Pembantu. Dokter umum ada sebanyak 5 orang, SKM sebanyak 2 orang, paramedis 85 orang dan pembantu paramedis ada sebanyak 9 orang.

Jalan merupakan salah satu prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar roda kegiatan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan di bidang sarana dan prasarana akan menuntun peningkatan pembangunan seperti jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lainnya.

Panjang jalan di Kabupaten Wakatobi tahun 2003 mencapai 343,10 km, yang merupakan jalan kecamatan dan jalan desa. Untuk transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan utama, yakni angkutan darat bermotor dan tanpa bermotor. Pada tahun 2003 jumlah angkutan mikrolet mencapai 118 buah, mobil barang 39 buah dan truk 5 buah.

Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting dan strategis bagi Kabupaten Wakatobi, karena daerah Wakatobi mempunyai perairan laut yang cukup luas dan terdiri dari beberapa pulau. Pada tahun 2003 tercatat 1.232 kunjungan kapal, yang semuanya merupakan pelayaran rakyat. Sedangkan penumpang yang naik sebanyak 27.628 orang dan turun sebanyak 31.579 orang. Angkutan barang yang dimuat pada tahun 2003 tercatat sebanyak 1.064,15 ton dan yang dibongkar sebanyak 5.330 ton.

Dalam kegiatan transportasi laut, pelabuhan memainkan peran vital dalam melayani berbagai kegiatan jasa, di antaranya melayani arus naik-turunnya

penumpang juga arus barang dan jasa. Pelabuhan utama di Kabupaten Wakatobi, terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan kapasitas pelayanan terbesar, dan telah ditingkatkan statusnya melayani Kapal Pelayaran Nasional (Pelni), dengan rute tertentu. Selain itu, pelabuhan yang masih digunakan untuk melayani arus penumpang, barang, dan jasa juga terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Tomia.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air minum di Kabupaten Wakatobi baru sebahagian kecil yang terlayani oleh perusahaan air minum, hanya mencakup masyarakat yang berdomisili di ibukota kabupaten, dalam hal ini di Kecamatan Wangi-Wangi. Sedangkan bagi masyarakat yang berdomisili di kecamatan lainnya dan di pedesaan umumnya masih menggunakan air yang berasal dari sumur dan mata air.

Jumlah pelanggan air minum tahun 2002 sebanyak 640 dan tahun 2003 mencapai 658 atau mengalami peningkatan sebesar 2,81%. Sedangkan volume air yang diproduksi tahun 2002 mencapai 118.953 m³ dan tahun 2003 sebanyak 148.621 m³ atau mengalami peningkatan sebesar 29,94%. Volume air minum yang dijual tahun 2003 sebanyak 518.877 m³ dan tahun 2002 sebanyak 106.938. Nilai air minum yang terjual tahun 2003 sebanyak Rp. 111.924.150 dan tahun 2002 hanya mencapai Rp. 82.097.000 atau mengalami peningkatan sebesar 36,33%.

Sebahagian besar kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Wakatobi dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan sebahagian lainnya dipenuhi oleh non PLN. Jumlah pelanggan Listrik Negara pada tahun 2003 sebanyak 9.652 dengan daya terpasang sebesar 6.047.905 VA. Sedangkan produksi listrik ada sebesar 6.278.762

kwh dengan tenaga listrik terjual sebesar 5.367.403 kwh dan nilai penjualan sebesar Rp. 2.791.737.755. Tercatat juga bahwa Kecamatan Wangi-Wangi yang masih bergabung dengan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan memiliki jumlah pelanggan tertinggi, yaitu 5.056 menyusul Kecamatan Tomia dan Kaledupa, masing-masing dengan pelanggan sebanyak 1.879 dan 1.720 serta terendah di Kecamatan Binongko dengan 997 pelanggan.

Sementara itu sistem penyampaian informasi, surat tetap menjadi jalur komunikasi yang utama. Karena itu diperlukan sarana Kantor Pos di Kabupaten Wakatobi. Hingga tahun 2003 di Kabupaten Wakatobi belum terdapat Kantor Pos Pusat (hanya ada di Kota Bau-Bau), yang baru ada hanya Kantor Pos Cabang, Rumah Pos, Bis Surat, dan Pos Keliling Desa. Jumlah Pos cabang tercatat sebanyak 2 buah, Rumah Pos 2 buah, Bis Surat 2 buah dan Pos Keliling Desa sebanyak 1 buah.

6. Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Wakatobi sebelumnya menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Buton, namun pada tahun 2003 wilayah ini resmi menjadi sebuah daerah otonom dengan wilayah meliputi 5 Kecamatan yakni Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Tomia dan Binongko dengan ibukota kabupaten berkedudukan di Wanci. Sampai tahun 2006 telah dimekarkan kecamatan baru yakni Kecamatan Kaledupa Selatan dan Tomia Timur.

Jumlah dinas/badan/kantor yang telah dibentuk untuk mengelola pemerintahan di Kabupaten Wakatobi adalah: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Badan Kegewaiian Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana, Dinas Perindag Koperasi dan Nakertrans, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kimraswil, Kantor Keatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Tata Ruang Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perkebunan, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan pada Sekretariat Daerah dilengkapi dengan asisten I dan asisten II, Kabag dan Kasubag seperti Kabag umum, Kabag Keuangan, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan.

Perolehan suara sah hasil Pemilu 2004 menurut keanggotaan dalam legislatif yang terdiri dari 40.090 untuk DPR Pusat, 37.761 untuk DPD, 33.147 untuk DPRD Provinsi dan 40.807 untuk DPRD Kabupaten. Hasil perolehan enam partai pemenang Pemilu untuk DPR Pusat partai Golkar menempati posisi I dengan jumlah perolehan suara sebanyak 12.165 suara (30,34%) disusul PPP 7.318 (18,25%), PAN 3.410 (8,50%), PBB 2.759 (6,88%), PDIP 2.580 (6,43%), dan PNBK sebanyak 2.309 suara atau 5,76%. Komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Wakatobi hasil Pemilu 2004 berdasarkan partai peserta Pemilu dan daerah pemilihan disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.10. Hasil Perolehan Suara Enam Besar Parpol Peserta Pemilu 2004
Untuk DPR Kabupaten Menurut Kecamatan

Kecamatan	Golkar	PPP	PAN	PBR	PDIP	PNBK	Lainnya	Jumlah
Binongko	3.166	108	719	3	591	30	1.518	6.135
Tomia	665	1.102	1.418	1.354	1.258	978	1.294	8.069
Kaledupa	2.483	309	358	837	683	74	2.744	7.488
Wangi-Wangi	523	731	1.237	1.617	533	584	4.277	9.502
Wangisel	1.267	2.017	392	110	650	1.275	3.493	9.204
Jumlah	8.104	4.267	4.124	3.921	3.715	2.941	13,326	40,398

Komposisi perolehan suara di DPRD Kabupaten Wakatobi hasil Pemilu 2004 berdasarkan partai peserta Pemilu dan daerah pemilihan adalah sebagai berikut: Golkar mendapatkan kursi terbanyak dengan mendapatkan 4 kursi disusul PBB, PPP, PAN, PNBK, PBR dan PDIP dengan 2 kursi, selanjutnya Partai Merdeka, PKB, Partai Patrot Pancasila dan Partai Demokrat masing-masing 1 kursi dari 20 kursi di DPRD Kabupaten Wakatobi.

B. Strategi Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mewujudkan wakatobi yang bersih dan nyaman, membentuk Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi. Pada tanggal 9 mei 2006 Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum berdiri sebagai sebuah organisasi yang baru yang dipimpin oleh seorang

pejabat setingkat eselon tiga (III). Sehubungan dengan tugas yang diembannya maka telah merumuskan visi sebagai berikut “terwujudnya kabupaten Wakatobi yang bersih, sehat, indah, nyaman dan tertata”, dan menetapkan misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih
2. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat tanpa sampah
3. Mewujudkan kota dalam taman yang indah dan asri
4. Mempermudah akses terhadap pelayanan dalam bidang pemadaman kebakaran
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang Pekuburan Umum

C. Peran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam Pelayanan Kebersihan

Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum Kabupaten Wakatobi mempunyai peran yang signifikan dalam mendukung terwujudnya visi pemerintah daerah kabupaten Wakatobi. Pada pasal 3 di ketahui bahwa Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum mempunyai tugas membantu Bupati Wakatobi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum. Untuk itu, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, pekuburan dan pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok jabatan fungsional
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan pekuburan umum kabupaten Wakatobi melakukan berbagai langkah dengan strategi tertentu yang bersentuhan dengan masyarakat setempat guna mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berbagai institusi lokal dan lembaga lainnya yang ada dalam masyarakat yang mempunyai visi yang berkaitan dengan visi Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum akan diidentifikasi guna memaksimalkan dukungannya terhadap pemerintah daerah kabupaten Wakatobi.

Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum menyadari bahwa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lokal atau lembaga lainnya serta masyarakat akan lebih maksimal hasilnya daripada bekerja sendiri. Untuk itu, dalam mendukung pengusaha pengumpul sampah plastik dan besi tua serta barang-barang bekas logam lainnya, kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sejak akhir tahun 2007 telah menyediakan tempat

penampungan sampah sementara baik dari drum bekas maupun bak sampah beton yang dipisahkan dengan sampah kering (kaca, besi, plastik, dan sebagainya) dan sampah basah (sampah dari bahan organik). Pengadaan dua jenis bak sampah tersebut diyakini dapat mempermudah para pemulung sampah mendapatkan dan memilahkan sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang.

Di samping itu, pada tahun 2008, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum telah memprogramkan pengadaan mesin pencacah sampah plastik. Harapannya, dengan mesin ini dapat memperkuat pengusaha-pengusaha sampah untuk memadatkan pengepakan sampah yang akan dikirim untuk di daur ulang di Surabaya dan daerah lainnya. Sehingga dengan keberadaan mesin ini, kemampuan para pengusaha untuk menggerakkan para pengumpul sampah bisa lebih baik. Pada sisi lain, keberadaan mesin tersebut dapat berguna bagi masyarakat sebagai bentuk lapangan kerja baru.

3.1. Struktur Organisasi

Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dibentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi. Kantor ini merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi

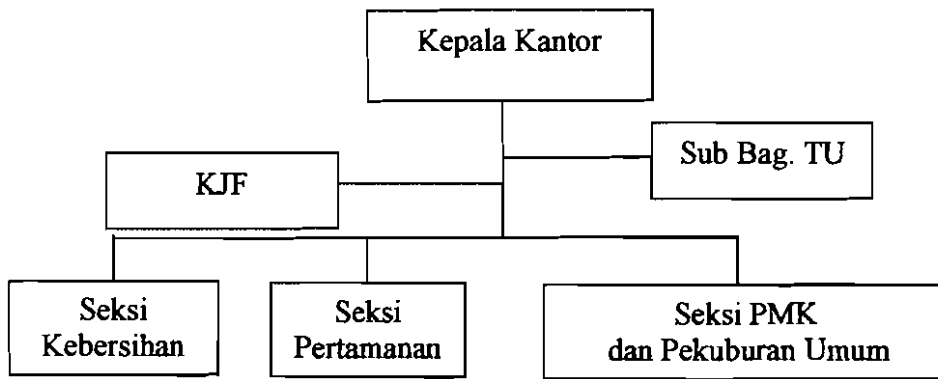
Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas tertentu di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan umum;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
3. Membina kelompok jabatan fungsional;
4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Perkuburan Umum Kabupaten Wakatobi terdiri atas:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Kebersihan
4. Seksi Pertamanan
5. Seksi Pemadam Kebakaran dan Pemakamam Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

Sedangkan struktur organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi, 2008

Secara umum, kepala kantor, kepala sub bagian dan kepala seksi di lingkungan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

2.2. Tugas Pokok (tupoksi) Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum

Roda pembangunan di Kabupaten Wakatobi dijalankan oleh bupati sebagai kepala daerah. Terkait dengan itu, kepala daerah membentuk badan, dinas dan kantor sesuai dengan tingkat kebutuhan daerah. Badan, dinas, dan kantor tersebut diberi tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui peraturan bupati nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum adalah unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah.
2. Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dipimpin oleh seorang kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
3. Tugas tertentu yang dimaksud dalam poin satu di atas adalah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan umum di kabupaten Wakatobi.

Selain tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum berfungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan umum;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan umum;
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
4. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun tugas dan fungsi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum untuk setiap bagiannya adalah sebagai berikut.

Sub Bagian Tata Usaha

1. Tugas

Tugas sub bagian tata usaha adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum yang meliputi urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, keuangan, pendidikan, dan pelatihan serta evaluasi dan pelaporan.

2. Fungsi

Fungsi utama sub bagian tata usaha untuk melaksanakan tugasnya adalah: (a) Menyusun rencana dan program Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum; (b) Melaksanakan urusan surat menyurat dan arsip; (c) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, rumah tangga, humas, dan protokol serta urusan pendidikan, dan pelatihan; (d) Melaksanakan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan anggaran; (e) Menyusunan dan menyampaikan evaluasi dan pelaporan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum; serta (f) sub bagian tata usaha juga berfungsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum.

Seksi Kebersihan

1. Tugas

Seksi kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kebersihan.

2. Fungsi

Terkait dengan tugasnya, seksi kebersihan mempunyai fungsi dalam (a) menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta penyusunan rencana program kebersihan; (b) melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan; serta (c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum Kabupaten Wakatobi.

Seksi Pertamanan

1. Tugas

Seksi pertamanan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum diberi tugas untuk menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan serta pemeliharaan dan pengelolaan pertamanan di Kabupaten Wakatobi.

2. Fungsi

Terkait dengan pelaksanaan tugasnya, seksi Pertamanan mempunyai fungsi dalam: (a) menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, penyusunan program, dan pelaksanaan kegiatan pertamanan; (b) melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan pertamanan; (c) melaksanakan penyiapan lahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertamanan pada tempat pertamanan umum dan khusus; (d) mengelola tempat pertamanan umum; (e) menyusun dan menyampaikan evaluasi, dan pelaporan; serta (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum.

Seksi Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum

1. Tugas

Seksi Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, kegiatan pengawasan, pengadaan, pemeliharaan peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran dan Pekuburan umum.

2. Fungsi

Terkait dengan upaya mewujudkan tugas yang diberikan, seksi pemadam kebakaran dan Pekuburan umum mempunyai fungsi dalam: (a) menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran dan Pekuburan umum; (b) melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan Pekuburan umum; (c)

menanggulangi bahaya kebakaran; (d) melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran dan Pekuburan umum; (e) menyusun dan menyampaikan evaluasi pelaporan; serta (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan suatu jabatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tugas jabatan fungsional ini adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, kepala kantor, kepala sub bagian dan kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Terkait dengan aspek manajerial, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi juga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya, serta setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Laporan yang disampaikan kepada atasan dan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Di samping itu, dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut, segala biaya yang diperlukan dalam lingkungan kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di samping itu, kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum juga dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelayanan kebersihan

Seiring desakan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat dan tuntutan kinerja organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum telah melakukan beberapa upaya guna terwujudnya pelayanan kebersihan secara maksimal sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan peneliti.

“Pelayanan yang diberikan oleh kantor ini kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban melalui peraturan Bupati Wakatobi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tupoksi yang intinya terwujudkan wakatobi yang bersih, indah, teratur, aman dan mempesona. Ini memang merupakan cita-cita yang hendak dicapai oleh kantor”.

Dalam kondisi yang demikian dimana Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum merupakan kantor baru sebagaimana terungkap dalam wawancara peneliti dengan kepala kantor, maka sangatlah berat beban tugas yang diemban dalam rangka pelayanan kebersihan. Keadaan ini ditegaskan kembali oleh kepala seksi kebersihan dalam sebuah wawancara peneliti yang dilakukan di Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum pada bulan Juni 2008 sebagai berikut.

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok kami di bidang kebersihan lingkungan, kami selalu berupaya untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat terutama yang memberikan pengaduan akibat belum optimalnya kegiatan kami. Dalam memberikan pelayanan dibidang kebersihan, kami menggerakkan semua apa yang kami miliki untuk kepuasan dan kesuksesan kegiatan dilapangan termasuk menambah jam kerja bila ada pekerjaan yang mendesak di masyarakat”.

Kebijakan pelayanan seperti ini merupakan wujud tanggungjawab yang harus dilakukan oleh instansi yang diberi kewenangan dalam hal pelayanan kebersihan. Untuk mendapatkan pelayanan diharapkan, kebutuhan tenaga operasional yang profesional dan memadai merupakan keharusan guna mewujudkan pelayanan kebersihan yang optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sebagaimana table 4.10, menggambarkan kondisi pegawai dan tenaga operasional masih sangat minim.

Table 4.11
Perkembangan PNS dan Tenaga Operasional Lapangan (honorar) pada kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi

No	Tahun	Jumlah Pegawai (orang)						JML
		PNS	Tng. Adm	Tng. Keb.	Tng. Taman	Tng. PMK	Tng. Pekub	
1	2006	2	3	5	-	-	-	10
2	2007	6	4	23	5	5	-	43
3	2008	8	12	45	5	15	5	90

Sumber data : Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum, tahun 2008

Sebagai institusi pemerintah daerah yang diberi tanggungjawab yang luas untuk melayani kebersihan demi menopang sektor pariwisata dan perikanan kelautan yang merupakan sektor andalan pembangunan kabupaten wakatobi. Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum melakukan pelayanan kebersihan di 11 wilayah

desa/kelurahan dengan jumlah personil kebersihan hanya 45 orang merupakan tantangan berat bagi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam menjalankan tugas pelayanan kebersihan. Kondisi ini terlihat dalam pernyataan kepala seksi kebersihan berikut ini:

“Peralatan kebersihan memang masih sangat kurang. Bapak bisa bayangkan dari 11 desa dan kelurahan dalam ibu kota (kec. Wangsel Kel. Mandati I, Kel. Mandati II, Kel. Mandati II, Pertokoan Jabal Rahman, Desa mola selatan dan Desa mola Utara) sementara Kec. Wangi-Wangi (Kel.Pongo, Kel.Wanci, Kel. Wandoka, Kel. Wandoka utara, dan Kel.Wandoka selatan). hanya dilayani oleh 3 buah mobil. Untung kami masih bisa memberdayakan gerobak sehingga membantu mobil untuk mengumpulkan sampah. Personil kami hanya 45 orang yang melayani keseluruhan wilayah operasi termasuk tenaga penyapu jalan. Jadi fasilitas kami masih jauh dari harapan”.

Keadaan ini juga dikeluhkan oleh masyarakat pelanggan yang membutuhkan pelayanan kebersihan yang maksimal. Ini terlihat dari pernyataan warga yang kami temui saat melakukan penelitian di beberapa wilayah pelayanan kebersihan.

“Pelayanan kebersihan diwakatobi ini harus lebih ditingkatkan agar wakatobi betul-betul bisa menjadi tuan rumah bagi wisatawan yang berkunjung. Hal yang perlu diperhatikan oleh kantor kebersihan adalah pembinaan dan penambahan tenaga lapangan agar betul-betul lebih profesional mengingat wakatobi khususnya pulau wangi-wangi sangat sempit sehingga kalau sampah tidak ditangani secara profesional maka tidak menutup kemungkinan wakatobi akan dilanda masalah sampah. Jadi mumpung baru dan sampah belum terlalu bermasalah mari kita galakan pembersihan lingkungan agar kita terhindar dari masalah sampah”. (Wawancara Juni 2008)

Harapan masyarakat ini tidaklah berlebihan, akan tetapi kondisi Pegawai dan Tenaga Operasional lapangan yang dimiliki Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sangat terbatas baik jumlah maupun kualitas sumber daya manusia sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana (S1)	5	3 PNS dan 2 Honorer
2	Diploma 3	1	Tenaga Honorer
3	SMA/Sederajat	74	5 PNS, 69 Honorer (Lapangan dan Staf Ktr)
4	SMP	10	Tenaga Lapangan
Total		90	

Sumber Data: Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum, tahun 2008

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam melihat kemampuan manajemen dalam instansi. Ketersediaan sumber daya manusia pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi masih sangat terbatas sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kebersihan. Kualitas pelayanan merupakan harapan masyarakat demi terwujudnya pelayanan kebersihan yang optimal. Sebagai warga yang peduli akan pentingnya kebersihan lingkungan, Akas Hamid pengusahan foto copy menyarankan kepada kantor agar pelayanan kebersihan lebih dioptimalkan dengan penambahan tenaga operasional dan

peningkatan sumber daya mereka melalui pelatihan. Hal ini dapat dicermati pada pernyataan Akas Hamid dalam wawancara peneliti yang dilakukan di depan toko Foto Abdi Jaya pada bulan juni 2008. "Yang perlu ditingkatkan sekarang adalah penambahan tenaga lapangan, melatih tenaga lapangan, penambahan tong sampah dan sosialisasi kemasyarakat supaya masyarakat tahu hak dan kewajibanya". Dari pernyataan beberapa informan yang peneliti wawancarai menggambarkan betapa besar harapan masyarakat akan pentingnya pelayanan kebersihan yang lebih profesional dan berkualitas. Kenyataan ini merupakan dorongan dan motivasi kepada pemerintah daerah khususnya Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Harapan ini dituangkan dalam pernyataan pada saat menjawab pertanyaan peneliti mengenai pelayanan kebersihan di wilayah kabupaten wakatobi. Dalam wawancara tersirat harapan masyarakat agar pelayanan kebersihan lebih ditingkatkan sebagaimana pernyataan berikut ini.

"Pelayanan Kebersihan sudah mulai nampak walaupun belum maksimal tetapi sudah nampak ada perubahan di bandingkan 2 tahun yang lalu. Pelayanan tetap harus dimaksimalkan lagi agar kota terlihat indah dan mempesona". (Wawancara maret 2008)

Bagi peneliti pernyataan ini merupakan motivasi bagi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam mengambil langkah-langkah konkrit dalam pelayanan kebersihan. Sebagai instansi yang diberikan kewenangan dalam pelayanan kebersihan, seyogyanya dapat memanfaatkan semua potensi yang ada termasuk masyarakat yang

memiliki semangat dan partisipasi dalam kebersihan walaupun tidak secara langsung. Untuk meningkatkan pelayanan Moch Ichsan (1998:22) menjelaskan bahwa ada beberapa substansi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi:

1. *Core skills*, pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki perangkat birokrasi baik menyangkut profesionalisme individu maupun kolektif untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan pasar secara kompetitif.
2. *technicians*, adalah kemampuan birokrat untuk menguasai aspek teknis secara profesional di bidang pekerjaan sehingga menunjukkan kinerja yang penuh rasa tanggung jawab (responsibility).
3. *Management*: kemampuan birokrat untuk dapat mengelola pekerjaan secara profesional baik menyangkut kinerja individual, kinerja tim maupun aspek managerial dan leadership.
4. *Skill*, ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur khususnya menyangkut bidang pekerjaannya, termasuk penyesuaian terhadap proses perubahan.
5. *Habits*, membiasakan bekerja secara profesional dengan tidak mengabaikan aspek etika dan moral sehingga akan tercipta kultur kinerja yang kondusif.
6. *Cohesion*, membiasakan bekerja secara sistemik atau keterpaduan antara berbagai komponen yang terlihat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

7. *Collective Experience*, menjadikan pengalaman individu atau kelompok tentang keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja sebagai pengalaman bersama.
8. *Knowledge of environment*, menyadari terjadinya perubahan setiap saat dalam suatu lingkungan sehingga pengetahuan tentang lingkungan untuk mengantisipasi perubahan sangat diperlukan.
9. *Technology*, diperlukan penguasaan teknologi sebagaimana persyaratan penting karena menguasai teknologi dapat diibaratkan menguasai dunia dan perubahan.

Dalam menghadapi tuntutan pelayanan kebersihan yang optimal dari masyarakat/pelanggan yang ditujukan kepada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dijawab dengan kerja keras melalui pembagian wilayah kerja sesuai dengan kondisi tenaga operasional yang dimiliki Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum saat ini. Penjabaran tenaga operasional dapat dilihat pada table 4.13 Berikut ini.

Tabel 4.13
Pembagian tugas Tenaga Operasional Kantor Kebersihan, Pertamanan,
Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi

No	Tenaga Staf/ Operasional	Tugas	Wilayah Tugas	Jmh (org)
1	Kebersihan	Penyapu Jalan	Jalan umum dan tempat lain yang ditentukan	13
		Pembawa Gerobak	Lorong di dalam wilayah ibukota	10
		Pembersih wilayah pesisir	Wilayah pantai dan pemukiman bajo	7
		Anggota Mobil	Semua Wilayah Operasi Kebersihan	9
		Sopir Dum Truk rangkap anggota	Semua Wilayah Operasi Kebersihan	6
	Total			45

Sumber data: Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum Kabupaten Wakatobi, 2008

Melihat pembagian tugas pada tabel 4.13, memberi gambaran bahwa harapan dan keinginan masyarakat tentang pelayanan kebersihan yang optimal masih merupakan tantangan bagi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum. Akan tetapi semangat instansi tidak boleh kendur hanya karena persoalan tenaga oprasional sebagaimana dalam table 4.13 diatas. Keterbatasan personil merupakan kendala dalam pelayanan kebersihan, tetapi semangat harus tetap dibangun pada tenaga operasional kebersihan agar tetap semangat dalam bekerja sambil berupaya menambah tenaga oprasional lapangan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Harapan pelayanan kebersihan dari tenaga operasional lapangan

masih terbuka lebar tinggal kemampuan instansi kebersihan dalam mensikapi setiap persoalan yang dihadapi. Harapan ini tertuang dalam pernyataan tenaga operasional lapangan yang menjadi informan dalam penelitian ini.

”sebenarnya sampah ini bisa diatasi asalkan masyarakat menyimpan sampah pada tempat sampah dan dibuang sebelum kita mengangkut sampah. Ini sudah lihat kita angkut belum dibawa sampahnya nanti kita pergi baru dibuang ke tong sampah”. (wawancara mei 2008).

Dari pernyataan ini mengisyaratkan kepada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum agar memperjelas dan mensosialisasikan tentang jadwal pelaksanaan pelayanan kebersihan. Hal ini sangat penting agar keterbatasan sarana angkutan sampah dapat diatasi karena masyarakat akan konsisten membuang sampah di tong sampah pada jadwal yang telah ditentukan. Persoalan jadwal pengangkutan sampah juga dikemukakan oleh kepala SDN II Mandati II dalam wawancara dengan peneliti berikut ini.

”Pelayanan kebersihan perlu dijadwalkan kembali, karena siswa kami nanti jam 6.30 baru menyapu sementara petugas kebersihan jam 06.00 sudah lewat depan sekolah kami makanya sampah tetap ada di tong sampah nanti besok baru diambil. Kebersihan harus jalan dengan sore supaya dapat menjawab masalah ini”. (Wawancara maret 2008).

Dari pernyataan ini menunjukan bahwa penjadwalan dalam pengangkutan sampah sangat penting agar semua sampah dapat terangkut dengan kondisi angkutan yang terbatas.

Wakatobi secara geografis memiliki wilayah dengan 97% wilayahnya adalah lautan dan 3% berada di wilayah daratan. Hal inilah yang mendorong

pemerintah daerah dan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum untuk memperhatikan pelayanan kebersihan di wilayah pesisir demi keamanan dan kenyamanan biota laut. Konsekwensi sebagai daerah kepulauan adalah tersebar nya penduduk disekitar pantai dan menimbulkan persoalan yang serius terhadap pelayanan kebersihan. Kenyataan ini merupakan tantangan bagi pengelola pelayanan kebersihan lingkungan mengingat salah satu sektor andalan pembangunan kabupaten wakatobi adalah sektor perikanan kelautan. Menurut kepala seksi kebersihan, pelayanan kebersihan di wilayah pesisir sangat dipantau tetapi ini merupakan komitmen kantor sesuai dengan instruksi bupati wakatobi tentang gerakan bebas sampah plastik. Pada saat wawancara di kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan pekuburan umum dengan kepala seksi kebersihan mengungkapkan persoalan pelayanan kebersihan di wilayah pesisir sebagai berikut. "Satu hal yang membebani pelayanan kami adalah pinggir pantai dan wilayah mola karena susah kami pantau sampah yang di buang di laut" (Wawancara April 2008). Selain pernyataan kepala seksi kebersihan, beberapa hasil wawancara peneliti dengan masyarakat (informan) menunjukan adanya permasalahan sampah di wilayah pantai.

"Sampah kita biasanya di buang kebelakang rumah nanti di bawa air pasang karena tong sampah ada dipinggir jalan baru Cuma 1 buah mau simpan di mana karena yang dipinggir jalan juga buang sampah, jadi kami lebih baik buang saja di dekat rumah langsung di bawa air laut. Ditong sampah kadang satu hari baru diangkat kadang juga tidak dan sudah busuk jadi mereka yang dipinggir jalan marah karena sampahnya busuk" (Wawancara maret 2008).

Hal senada juga terungkap dari pelayanan sampah pada Rumah Makan Wisata yang berada di pinggir pantai. "Sebagian buang sampah ke karung tapi sebagian kelaut karena karungnya sudah penuh apalagi petugas sampah tidak ambil kadang sudah busuk makanya biasanya langsung di buang kelaut". (Wawancara maret 2008). Mengingat pemerintah daerah sangat konsisten dengan sampah plastik yang terbangun kelaut, maka ini harus menjadi fokus perhatian dari Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum demi suksesnya intruksi bebas sampah plastic dan kebersihan wilayah perairan wakatobi.

Persoalan sampah diwakatobi mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Bupati Wakatobi dalam memberantas sampah plastik melalui instruksi Bupati nomor 88 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih Tanpa Sampah Plastik Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Instruksi ini mendapat sambutan positif dari Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sebagaimana diungkapkan oleh kepala kantor berikut ini.

"Kami selalu anjurkan kemasyarakat untuk tidak membuang sampah plastic apalagi dibuang kelaut. Sudah beberapa kali instruksi dari bupati tentang Bebas sampah plastic, dan setiap Dinas, Badan dan Kantor mendapatkan tugas/wilayah kerja dan pengawasan sampah terutama sampah plastic. Setiap kali saya menghadap beliau selalu di ingatkan akan bahaya sampah plastic terutama yang dibuang kelaut karena sangat merusak ekosistem laut' (Wawancara maret 2008).

Harapan pemerintah daerah dan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum untuk terwujudnya bebas

sampah plastik di tanggap beragam oleh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini.

”Pernah dengar tentang bebas sampah plastik tapi mau bagaimana siapa yang pilah sampahnya, tong kebersihan ada plastik dan non plastik tapi tong plastik itu sekitar 20 meter dan yang di depan itu hanya satu buah apa itu plastik atau non plastik”

Ada juga pernyataan lainnya yang peneliti temukan di lapangan saat wawancara bulan Mei 2008 ” Pernah dengar tentang bebas sampah plastik tetapi bagaimana maksudnya kami belum paham, lalu siapa yang pilah sampah plastik pak, Repot pak kita banyak kerja”. Dari pernyataan-pernyataan informan tersebut menggambarkan bahwa instruksi bupati wakatobi perlu sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat memahami maksud dan tujuan dari instruksi tersebut. Harapan dan keinginan untuk memperbaiki dan menyelamatkan wakatobi dari persoalan sampah memerlukan kerjasama semua lapisan masyarakat untuk sama-sama bertanggungjawab mewujudkan kebersihan lingkungan. Untuk mensosialisasikan intruksi tersebut diharapkan kantor kebersihan dapat bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional yang bergerak dalam pelestarian lingkungan hidup, yakni Lembaga Komingku Wakatobi, Radio Bandsol (lokal), Radio Ngkalo (lokal), TV Kabel (lokal), Pramuka Kwarcab Wakatobi, TNC/WWF Indonesia, COREMAP II Wakatobi. Organisasi ini sangat peduli akan kebersihan lingkungan. Hal ini terungkap dalam wawancara bulan mei 2008.

“untuk mewujudkan Wakatobi dengan lingkungan yang lebih baik, kami akan selalu komitmen memberikan penyuluhan kepada

masyarakat, baik dalam bentuk dialog interaktif maupun pemutaran iklan dan kuis berhadiah”.

Semangat dan partisipasi dari organisasi merupakan harapan dari Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam menghadapi masyarakat yang kurang peduli pada pelayanan kebersihan lingkungan asalkan dari instansi dapat memberdayakan potensi yang ada. Sonny Keraf menerapkan 8 Prinsip-prinsip Etika Lingkungan sebagai pegangan dan tuntunan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, yaitu :

1. Sikap Hormat terhadap Alam

Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya.

2. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan isinya.

3. Prinsip Solidaritas

Yaitu prinsip yang membangkitkan rasa solid, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan.

4. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian

Prinsip satu arah , menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk alam.

5. Prinsip “No Harm”

Yaitu Tidak Merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu

6. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam

Ini berarti , pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai obyek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia.

7. Prinsip Keadilan

Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari.

8. Prinsip Demokrasi

Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbeaan keanekaragaman sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan

didalam menentukan baik-buruknya, rusak-tidaknya, suatu sumber daya alam.

9. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam.

Belum optimalnya pelayanan kebersihan oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum menimbulkan sorotan tajam dari masyarakat sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan informan berikut ini.

”Kegiatan pelayanan kebersihan belum maksimal terutama manajemen yang digunakan belum mampu menyentuh persoalan di masyarakat. Kalau manajemennya mantap tidak ada pekerjaan yang sulit, apalagi hanya persoalan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga”. (wawancara Juni 2008).

Bagi peneliti sorotan masyarakat ini harus menjadi pemicu bagi aparaturnya untuk meningkatkan sumber daya dan manajemen pengelolaan sampah di lingkup pemerintah kabupaten wakatobi khususnya Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sehingga pelayanan lebih maksimal sehingga terwujud wakatobi yang bersih, sehat, nyaman dan mempesona sebagaimana dalam visi dan misi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum.

Instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat harus memiliki kepekaan terhadap keluhan dan harapan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan akan berakibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Wujud ketidak patuhan ini di tuangkan dalam sikap penolakan terhadap apa yang disampaikan walaupun untuk kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini terlihat dari pernyataan penyapu jalan berikut ini. “Sosialisasi harus orang kantor, kita ini hanya menyapu saja tiap hari, kalau masyarakat ditegur soal sampah dibuang di tong mereka bilang itu tugasnya kebersihan”. (Wawancara maret 2008). Sikap masyarakat yang seperti bukanlah sikap masyarakat yang sesungguhnya karena pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh penyapu jalan hanya untuk kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Dari pernyataan seperti ini sebaiknya instansi kebersihan mencari akar permasalahan sehingga meluas pada masyarakat yang lainnya. Untuk mengantisipasi persoalan seperti ini maka instansi kebersihan harus melaksanakan pelayanan publik yang lebih profesional dan berkualitas.

2. Saranan dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kebersihan

Berdasarkan penelusuran peneliti tentang ketersediaan sarana prasarana kebersihan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum diperoleh data dari pemegang barang (Satiba) kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum kabupaten Wakatobi sebagai berikut.

- 1). Angkutan Kendaraan Bermotor
 - Dump Truk Volumen 6 Kubik 3 buah
 - Pick Up 1 buah
 - Motor Gerobak Sampah 1 buah
- 2). Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor
 - Gerobak 40 buah
- 3). Alat-alat kebersihan
 - Sapu 30 buah
 - Skopang 10 buah
 - Keranjang 10 buah
 - Tong sampah 170 buah
 - Kantong sampah (Karung) 1500 buah

Keterbatasan sarana prasarana Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum juga di ungkapkan oleh Kepala Seksi Kebersihan dalam pertemuan kami di kantor Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum kabupaten Wakatobi.

"Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum untuk wilayah kebersihan sampai tahun 2008 baru memiliki 3 buah mobil (Dump truk bantuan prov. 2 buah dan 1 buah pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten pada bulan oktober 2008), gerobak sampah 40 buah dan 1 motor gerobak sampah (juni 2008 diadakan). Dengan keterbatasan alat ini kami berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah dalam kota (Wawancara bulan maret 2008)

Permasalahan mendasar yang terjadi pada setiap daerah pemekaran baru selalu berujung pada ketersediaan anggaran yang terbatas dan akan mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Hal ini di alami oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum yang memiliki sarana prasarana penunjang pelayanan kebersihan seperti yang terungkap dalam wawancara dengan kepala seksi kebersihan tersebut. Namun kondisi yang demikian ini harus disikapi dengan peningkatan sumber daya

aparatur sehingga mereka mampu menempatkan anggaran sesuai dengan skala prioritas. Hal ini hanya dapat terwujud manakala aparatur mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah yang bersifat prioritas.

Perkembangan anggaran yang dimiliki Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam 3 tahun terakhir masih sangat minim dan membutuhkan telaah yang profesional sehingga pembagian anggaran setiap bidang sesuai dengan program prioritas yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Dalam tabel 4.13 memberikan gambaran tentang keadaan anggaran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sampai tahun 2008

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.13

Kadaan Anggaran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran,
dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi

No	Thn Angg	Pagu Anggaran (Rp)	Seksi	Anggaran (Rp)
1	2006	336.540.000,-	Kebersihan	-
			Pertamanan	-
			Pemadam Kebakaran	-
			Pekuburan Umum	-
2	2007	2.586.192.000,-	Kebersihan	588.410.000,-
			Pertamanan	237.684.000,-
			Pemadam Kebakaran	718.614.000,-
			Pekuburan Umum	185.764.000,-
3	2008	3.241.966.048,-	Kebersihan	618.278.000,-
			Pertamanan	32.378.000,-
			Pemadam Kebakaran	1.124.698.000,-
			Pekuburan Umum	29.833.000,-

Sumber data: Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan
Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi, 2008

Mencermati perkembangan jumlah anggaran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dari tahun 2006 hingga tahun 2008 menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap keberadaan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sangat

besar. Ketersediaan anggaran sebagaimana dalam tabel 4.13 bagi kantor yang memiliki tugas pokok yang luas jelas masih kurang, akan tetapi kondisi ini dialami oleh setiap daerah pemekaran baru. Untuk itu, aparatur harus mampu memilah dan memilih program yang sifatnya prioritas yang terkait dengan pencapaian visi dan misi pemerintah. Pemerintah daerah menitikberatkan sektor pariwisata dan perikanan kelautan menjadi tumpuan dan harapan pendapat asli daerah. Kantor sebagai perpanjangan tangan kebijakan pemerintah daerah, seyogyanya harus mampu menterjemahkan anggaran kantor sesuai dengan program prioritas daerah. Sektor pariwisata dan perikanan kelautan membutuhkan kondisi lingkungan yang bersih baik lingkungan darat maupun lingkungan laut. Oleh karena itu, maka anggaran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum harus memprioritaskan anggaran pada bidang kebersihan. Dalam penjabaran anggarannya pada tahun 2007 dan tahun 2008 dalam tabel 4.13 menunjukkan bahwa pembagian anggaran setiap bidang belum memenuhi harapan pemerintah daerah untuk menjadikan kebersihan sebagai penopang pariwisata dan perikanan kelautan. Bryant dan White (1982: 346) mengatakan bahwa salah satu kelemahan pemerintah daerah adalah selalu bergantung pada pendanaan untuk mengadakan berbagai sarana dan prasarana pendukung termasuk manajemen. Dengan demikian, organisasi-organisasi teknis yang memberikan pelayanan juga mengalami kendala.

Menurut peneliti, penyebab terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan kebersihan sebagaimana dalam temuan dan hasil wawancara

disebabkan terbatasnya kemampuan aparaturnya dalam mensikapi anggaran tidak mengacu kepada skala prioritas pemerintah daerah. Hal ini akan berdampak pada upaya pelayanan kebersihan oleh tenaga operasional lapangan seperti pernyataan informan dalam wawancara dengan peneliti di lokasi TPA sebagai berikut.

“Mobil seharusnya ditambah paling tidak 2 mobil satu wilayah, peralatan kebersihan yang ada di mobil ini sangat kurang, karena seharusnya alat-alat seperti sekopang, keranjang harus tetap ada di mobil, dulu ada setelah rusak tidak ada lagi. Jadi kami terhambat dalam bekerja karena peralatan kurang atau bahkan tidak ada lagi” (wawancara maret 2008)

Keluhan tenaga operasional lapangan di setiap wilayah hampir sama yaitu sarana prasarana sangat terbatas. Tenaga operasional yang bekerja di wilayah mola/daerah pantai juga mempersoalkan keterbatasan sarana prasarana yang berujung pada tidak maksimal kegiatan mereka. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan berikut ini, “di wilayah mola jarang kelihatan tong sampah dan perlu di adakan karena kalau tidak mereka buang di laut dan susah membersihkannya”. (Wawancara maret 2008).

Keterbatasan sarana prasarana pelayanan kebersihan berdampak pada penagihan retribusi sampah di masyarakat. Misalnya pernyataan informan berikut ini “Tolong kastau kebersihan pak supaya sampah di wisata diperhatikan jangan Cuma tagih retribusi, karena kalau tidak diambil dan sudah busuk karyawan kami akan buang di laut sementara kita dianjurkan untuk tidak membuang sampah ke laut”. Dalam wawancara peneliti dengan masyarakat hampir semua informan mengeluhkan kekurangan sarana dan

prasarana kebersihan. Keluhan ini disampaikan pada saat wawancara bulan mei 2008 antara lain: "Perlu tambah tong sampah kalau perlu tong sampah permanen supaya sampah tidak terhambur disekitar tong sampah yang ada", dan "Tambah tenaga dan gerobak, kalau gerobak susah karena jalan lebih baik ganti dengan sampan (koli-koli) supaya bisa dijangkau lebih jauh".

Hal menarik bagi peneliti adalah solusi yang di tawarkan oleh informan pada wawancara peneliti pada bulan juni 2008.

"Kekurangan fasilitas kebersihan seharusnya disiasati dengan sosialisasi dimasyarakat agar mereka menyadari akan pentingnya lingkungan yang bersih sehingga mereka ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga".

Untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan kebersihan dilakukan sosialisasi program yang ada dan yang direncanakan kepada masyarakat/pelanggan, agar mereka mengetahui keadaan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum. Harapan ini terlihat dari wawancara berikut ini "Kami berharap agar kebersihan banyak-banyak sosialisasi, apalagi dengan instruksi bebas sampah plastik yang sarannya belum terpenuhi. Tong sampah hanya satu buah setiap tempat" (Maret 2008). Keterbatasan sarana seperti ini harus diadakan pendekatan kepada masyarakat, sebab tong sampah hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat sampah yang bias digunakan. Untuk pendekatan instansi terkait merupakan solusi dari keterbatasan sarana sehingga masyarakat dapat menyiapkan tempat sampah alternative seperti karung bekas, dos bekas atau semacamnya.

Wakatobi sebagai daerah kepulauan yang memiliki pemukiman di pinggir pantai dan wilayah laut harus memiliki sarana prasarana pelayanan kebersihan sesuai dengan kondisi wilayah yang dilayani. Untuk wilayah mola dan pinggir pantai memiliki penanganan kebersihan yang berbeda dengan wilayah daratan. Jika di wilayah daratan didominasi oleh gerobak sampah, maka di wilayah mola dan pinggir pantai harus menggunakan peralatan di laut seperti halnya sampan (koli-koli). Dari penuturan masyarakat mola dalam wawancara peneliti ini tergambar sarana prasarana yang dibutuhkan di wilayah tersebut, "Tambah tong sampah dan adakan pengadaan sampan (koli-koli) supaya semua wilayah bisa dijangkau. Kalau mau lebih bagus pelayanan di mola supaya angkat orang mola untuk operasional kebersihan". (Wawancara Mei 2008). Keinginan dan harapan masyarakat ini sebaiknya dijadikan rujukan dalam pengangkatan tenaga lapangan sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kebersihan sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli akan pelayanan kebersihan. Konsep ini sangat efektif karena bila masyarakat sudah mengharapkan seperti ini berarti mereka ingin menyatu dengan kegiatan ini, tetapi bila tidak tercapai maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu masyarakat enggan untuk berpartisipasi.

Pengadaan sampan (koli-koli) sangatlah penting sebagaimana yang disarankan dalam wawancara tersebut karena merupakan sarana yang menunjang pelayanan kebersihan terutama sampah plastik yang terbuang kelaut. Jika hal ini terpenuhi dan dapat dilaksanakan dengan baik, ini merupakan sinergis program Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam

Kebakaran, dan Pekuburan Umum dengan kebijakan pemerintah daerah yang telah memprogramkan bebas sampah plastik melalui instruksi bupati Wakatobi Nomor 88 Tahun 2007 dan Nomor 321.A tahun 2008.

Sinerginya program Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dengan program pemerintah daerah dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan pemerintah terhadap kinerja Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sehingga dalam penggaran tahun berikutnya dapat memperbaiki pos anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor terutama sarana dan prasarana pelayanan kebersihan.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kebersihan

Dari hasil pengamatan di lapangan terhadap pelayanan kebersihan oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum menunjukan masih kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kabupaten wakatobi. Untuk memberdayakan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah, seharusnya bidang kebersihan mengidentifikasi institusi lokal dan lembaga lain yang ada dalam masyarakat yang mempunyai visi yang berkaitan dengan visi kebersihan atau masyarakat yang peduli akan kebersihan lingkungan. Dalam pengamatan peneliti selama dilapangan menunjukan adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan wakatobi yang bersih dari sampah baik sampah organik maupun sampah non organik. Hal ini terlihat dari kegiatan beberapa lembaga yang selalu aktif untuk mengkampanyekan tentang penyelamatan lingkungan seperti radio

bandsol, radio ngkalo, lembaga komingku, TNC/WWF. Lembaga-lembaga ini telah melaksanakan sejumlah pelatihan pengolahan sampah organik kepada sejumlah pengurus dasa wisma di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan Kecamatan Wangi-Wangi. Wawancara peneliti dengan ketua kelompok dasa wisma melati kelurahan Wanci sebagai berikut.

“kami merasa bersyukur atas pelatihan pembuatan kompos yang dipelopori lembaga Komingku. Pupuk kompos yang dihasilkan dari pelatihan tersebut sudah kami manfaatkan untuk menyuburkan tanaman kelompok dasawisma kami sehingga bisa tumbuh subur. Dan pada lomba tingkat kabupaten mengenai keindahan dasawisma, kelompok kami menjadi salah satu kelompok pemenang”. (wawancara maret 2008).

Bila kegiatan-kegiatan tersebut mendapat sentuhan maksimal dari pemerintah daerah maka dapat dipastikan bahwa tugas pemerintah daerah dalam hal ini kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum akan lebih ringan. Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga-lembaga tersebut ikut mengkampanyekan lingkungan yang bebas sampah plastik, bakti sosial pembersihan pasar, berkolaborasi melaksanakan pengadaan tong sampah yang disimpan di beberapa sudut kota serta program dialog interaktif melalui radio tentang sanitasi dan pentingnya hidup sehat dan lingkungan bersih.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap lembaga-lembaga yang aktif dalam bidang lingkungan diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum kabupaten Wakatobi dalam mewujudkan kabupaten

Wakatobi yang bersih, sehat, indah, nyaman dan tertata juga ditemukan oleh lembaga Komingku, Pramuka, TNC/WWF Indonesia, Radio Bandsol dan Radio Ngkalo. Permasalahan bersama itu adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Oleh karena, ke lima lembaga tersebut berulang kali memprogramkan sosialisasi membuang sampah pada tempatnya pada masyarakat, mulai sosialisasi ditingkat sekolah-sekolah melalui pelibatan siswa-siswa dalam pembersihan lingkungan, serta di tingkat masyarakat untuk bergotong-royong membersihkan lingkungan sekitar.

Dalam pengamatan peneliti memperoleh informasi bahwa Ke lima lembaga itu juga membuka kuis tentang lingkungan yang dilakukan di radio selama delapan bulan. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut belum mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah daerah. Artinya, kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum belum memanfaatkan lembaga-lembaga serta kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama dalam penanganan sampah di kabupaten Wakatobi dengan baik. Walaupun dalam banyak hal, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum masih menyadari bahwa mereka mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk mengimplementasikan tugasnya. Pernyataan ini sebagaimana diungkapkan kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum “kami menyadari, keterbatasan yang kami miliki. Kami juga menyadari

bahwa masih banyak permasalahan yang belum kami selesaikan. Dan hal itu merupakan tugas yang harus kami pikirkan ke depan”. (Wawancara mei 2008)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden ditemukan bahwa kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan pekuburan umum belum melaksanakan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lokal, termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang bervisi sama. Hal tersebut disebabkan minimnya anggaran yang melekat pada kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum. Di sisi lain, ketika dilakukan konfirmasi dengan lembaga-lembaga lokal serta kelompok-kelompok masyarakat yang bervisi sama tersebut tentang kesiapan mereka untuk melaksanakan kolaborasi dengan kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan pekuburan umum dalam hal penciptaan lingkungan yang bersih, lembaga-lembaga itu mengatakan

“untuk bekerja mewujudkan lingkungan yang bersih, kami tidak perlu harus diberi anggaran. Asal persoalan itu dikomunikasikan, kita tetap bisa berjalan bersama. Buktinya, kami tetap jalan untuk mewujudkan visi kami walaupun tanpa anggaran yang mereka berikan kepada kami” tutur Masudin, yang sekaligus direktur radio bandsol Wakatobi.

Ia menambahkan bahwa: “untuk mewujudkan Wakatobi dengan lingkungan yang lebih baik, kami akan selalu komitmen memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik dalam bentuk dialog interaktif maupun pemutaran iklan dan kuis berhadiah”. Kepedulian dari lembaga ini sangat membantu dalam mensukseskan program pelayanan kebersihan termasuk gerakan bebas sampah plastik. Lembaga semacam ini hanya membutuhkan perhatian dan penghargaan dari apa yang mereka lakukan untuk membantu

program pemerintah dalam hal pelayanan kebersihan pada masyarakat. Penghargaan bagi mereka adalah tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan visi dan misi organisasinya.

Di tempat terpisah, direktur lembaga komingku, Harviyadin mengatakan bahwa:

“untuk berkolaborasi dengan instansi lain dalam mewujudkan Wakatobi yang bersih tidak mesti bentuknya dengan menggunakan uang, akan tetapi asal ada komunikasi yang terbuka kita tetap bisa berkolaborasi untuk mewujudkan visi yang telah kita buat”. Lembaga komingku hingga kini tetap berupaya mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan sekitarnya. Ali Basaru, sebagai salah seorang staf lembaga komingku menambahkan bahwa dua minggu lalu kami melakukan kerjasama dengan siswa-siswa SLTP dan SLTA di Kapota untuk melakukan perjalanan memasuki hutan dengan tujuan menumbuhkan kecintaan generasi muda itu terhadap lingkungan sehingga ada kepedulian dalam diri generasi muda itu untuk menjaga dan memelihara lingkungan hutan dari kerusakan”, (Wawancara Juni 2008)

Harapan masyarakat atas pedulinya terhadap kebersihan lingkungan di kemukakan oleh informan dalam wawancara peneliti bulan mei 2008.

”Pemerintah masih kurang sosialisasinya pak, harusnya bikin kerja sama dengan kita dalam rangka kebersihan. Kita selalu kerja bakti dengan ibu-ibu dasa wisma setiap hari sabtu”.

Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum menyadari bahwa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lokal atau lembaga lainnya serta masyarakat akan lebih maksimal hasilnya daripada bekerja sendiri. Untuk itu, dalam mendukung pengusaha pengumpul sampah plastik dan besi tua serta barang-barang bekas logam lainnya, kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sejak akhir tahun 2007 telah menyediakan tempat penampungan sampah sementara

baik dari drum bekas maupun bak sampah beton yang dipisahkan dengan sampah kering (kaca, besi, plastik, dan sebagainya) dan sampah basah (sampah dari bahan organik). Pengadaan dua jenis bak sampah tersebut diyakini dapat mempermudah para pemulung sampah mendapatkan dan memilahkan sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang.

Di samping itu, pada tahun 2008, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum telah memprogramkan pengadaan mesin pencacah sampah plastik. Harapannya, dengan mesin ini dapat memperkuat pengusaha-pengusaha sampah untuk memadatkan pengepakan sampah yang akan dikirim untuk di daur ulang di Surabaya dan daerah lainnya. Sehingga dengan keberadaan mesin ini, kemampuan para pengusaha untuk menggerakkan para pengumpul sampah bisa lebih baik. Pada sisi lain, keberadaan mesin tersebut dapat berguna bagi masyarakat sebagai bentuk lapangan kerja baru.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kebersihan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ditemukan beberapa hal yang mempengaruhi pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum seperti pernyataan kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum berikut ini.

“Kami selalu memprogramkan semua masukan dari masyarakat pada saat musrembang tetapi kalau sudah di TIM anggaran tidak sesuai lagi dengan yang kami programkan. Alasannya karena anggaran kurang pada hal program itu penting. Kalau bapak Tanya ke masyarakat

begitu keinginannya dan mereka sudah usulkan. Contohnya TPS permanen banyak usulan dari masyarakat tetapi mereka tidak mau lokasinya di simpankan TPS, dan juga pak bupati tidak mau ada TPS. TPS yang ada itu program dari buton yang kerjakan oleh dinas PU". (Wawancara maret 2008).

Dari pernyataan ini terlihat tidak sinkronnya program kantor dengan TIM anggaran dari pemerintah daerah. Keadaan ini menyebabkan terbengkalainya beberapa program kantor yang telah diusulkan oleh masyarakat pada saat musrembang. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum dapat menghambat pelayanan kebersihan yang berakibat tidak maksimalnya hasil yang diharapkan terutama gerakan bebas sampah plastic.

Kebijakan yang tidak searah antara pemerintah daerah dengan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum berdampak pada berkurangnya anggaran sehingga sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan kebersihan juga terbatas. Hal ini diungkapkan oleh kepala seksi kebersihan.

"Peralatan kebersihan memang masih sangat kurang. Bapak bisa bayangkan dari 11 desa dan keluarahan hanya dilayani oleh 3 buah mobil. Untung kami masih bisa memberdayakan gerobak sehingga membantu mobil untuk mengumpulkan sampah. Jadi fasilitas kami masih jauh dari harapan"

Seiring dengan pernyataan ini, hasil wawancara kami dengan tenaga operasional lapangan juga mengeluhkan keterbatasan sarana prasaran pelayanan kebersihan. "Mobil perlu di tambah karena kami kewalahan apalagi

hari senin atau ada acara/keramaian kita hampir gila mengangkut sampah”. (Wawancara Mei 2008). Hal senada dengan keluhan masyarakat yang disampaikan dalam wawancara peneliti bulan maret 2008 sebagai berikut. ”Tempat penampungan sampah harus diperbanyak minimal 1 buah setiap rumah”.

Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan kebersihan oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum sangat beragam. Dari pengamatan kami dilapangan yang terangkum dalam wawancara dengan informan, pada dasarnya masih banyak masyarakat yang belum peduli akan pentingnya kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tenaga operasional penyapu jalan berikut.

”Sebenarnya sampah tidak terlalu banyak diwilayah saya tetapi mereka tidak simpan pada tempatnya sehingga kita yang menyapu kewalahan. Kesadaran masyarakat masih sangat kecil dalam menjaga kebersihan lingkungan”. (Wawancara mei 2008).

Kondisi ini juga ditemukan dalam pernyataan beberapa tenaga operasional lapangan yang mengeluhkan ketidak pedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

“Masyarakat sebagian ada yang membantu dengan mengumpulkan sampah pada tong sampah tapi lebih banyak yang tidak pusing mau di buang di tong atau tidak, katanya ada orang kebersihan yang ambil”. (Wawancara maret 2008)

”Masih perlu sosialisasi agar sampah disimpan pada tempat sampah. Kantong sampah yang kami berikan tidak digunakan untuk tempat sampah sehingga sampah mereka berhamburan disekitar pagar penduduk”. (Wawancara mei 2008)

”Kendala kami dilapangan terutama masyarakat banyak yang tidak tepat waktu buang sampah dan sampah biasanya di buang dekat

pagarnya saja tidak ada tong sampah. Kami juga sering sampaikan tapi mereka jawab ia tapi besok begitu juga”. (Wawancara mei 2008)

Dari pernyataan tersebut diatas, sudah tergambar bahwa penyelesaian persoalan sampah bukan hanya sekedar sarana dan prasarana yang dipenuhi, akan tetapi kesadaran melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan sangat penting agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung atas kebersihan dilingkungan sekitarnya. Yang menjadi catatan penting dari kondisi masyarakat yang kurang peduli akan kebersihan lingkungan adalah sebab dan penyebabnya. Hal ini penulis tekankan mengingat kebersihan lingkungan adalah bagian dari diri kita sendiri. Lingkungan yang kotor akan menimbulkan kondisi yang tidak nyaman dan aktifitas kita tidak nyaman pula. Dari gambaran ini penulis berkeyakinan bahwa masyarakat pasti mau akan kebersihan, maka dari itu Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum harus banyak melakukan sosialisasi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau organisasi lokal yang memiliki visi yang sama untuk berperan dalam pelayanan kebersihan lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelayanan Kebersihan oleh kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan Umum kabupaten Wakatobi memberikan dukungan bagi terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya perbaikan keindahan lingkungan untuk menambah keindahan sektor pariwisata, perikanan dan kelautan sebagai sektor andalan pembangunan daerah. Upaya pelayanan kebersihan tersebut belum dapat berjalan secara maksimal disebabkan oleh berbagai kendala /keterbatasan yang dimiliki oleh kantor kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, dan Pekuburan Umum kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kebersihan pada kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

- a. Terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menguasai aspek teknis secara professional di bidang pelayanan kebersihan sehingga menunjukkan kinerja yang tidak maksimal;
- b. Sumber daya aparatur tidak memiliki keterampilan khusus di bidang pelayanan kebersihan
- c. Belum memberdayakan masyarakat secara maksimal dalam pelayanan kebersihan;
- d. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

- e. Belum memadainya sarana prasaranan yang dimiliki oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum dalam melaksanakan pelayanan kebersihan

B. Saran

Untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan umum maka:

1. Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan
2. Dalam pelayanan kebersihan perlu pelibatan masyarakat
3. Kantor harus memiliki strategis khusus (Pemberian penghargaan) kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pelayanan kebersihan
4. Perlu adanya penambahan sarana prasarana pelayanan kebersihan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. (2010). *Pelayanan Publik yang berkualitas*. Makasar: LPPM STMK Handayani Makasar
- Abdulsyani. (1986). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Azwar, A. (1979). *Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bryant, C. dan White, L. (1982). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Sedang Berkembang*. Diterjemahkan oleh Rusianto. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, J.W., (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publications Inc, Thousand Oaks London New Delhi.
- Denzin, K, Norman dan Lincoln, S, Yvonna, (1994). *Handbook Of Qualitative Research*, Sage Publication Inc, Thousand Oaks London New Delhi.
- Gaspersz, V. (1997). *Manajemen Kualitas Penerapan Konsep-konsep Kualitas dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta: Gramedia.
- Hornby. (2000). *Cambridge Advanced Learners Dictionary*. Oxford University: Oxford University Press.
- Koswara, E. (1998). *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Lenvinne & Charles, H. (1990). *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Illionis: Scot Foreman.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (1998). *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta: YPA-LAN RI.
- Munir. (1998). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ichsan, Moch. (1998). *Kualitas Pelayanan Publik*. Ikip Malang.
- Ndraha, T. (1987). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ndraha, T. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmandi, A. (1999). *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Lingkaran Bangsa.

- Nugraha, M.Q. (2007). *Manajemen Strategik Organisasi publik*. Jakarta: universitas Terbuka.
- Osborne, D. and Plastrick P. (1997). *Banishing Bureaucracy*. USA: Addison Wesley Publishing Company.
- Poloma, M. M. (1987). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.
- Rasyid, M. Ryaas. (1997). *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rasyid, M. Ryaas. (1997). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ratminto dan Winarsih A.S. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salusu, J. (1998). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, S.P. (1992). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sinulingga, B. (1999). *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sinambela. (2006). *Reformasi pelayanan public*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Strauss, A. dan Corbin J. (1990). *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures And Techniques*. New Delhi. Sage Publication Inc, Thousand Oaks.
- Sutopo dan Sugianti. (1990). *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Prima.
- Keraf, Sonny. (2010). *Etika Lingkungan*. Penerbit: kompas.
- Sugiarto, E. (1999). *Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia.
- Terry, George R. (1984). *Guide to Managemen*. diterjemahkan oleh J. Smith D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjiptono. (1996). *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Bandung: Andi Publisher.
- Winardi dan Nisjar K. (1997). *Manajemen Strategik*. Bandung: Mandar Maju.

PEDOMAN WAWANCARA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN KEBERSIHAN PADA KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMADAM KEBAKARAN, DAN PEKUBURAN UMUM

Apa, bagaimana, mengapa

- A. Pegawai kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum
1. Menurut bapak, bagaimana pelayanan kebersihan yang diberikan oleh kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum terhadap masyarakat?
 2. Menurut bapak, bagaimana ketersediaan sarana prasarana kebersihan pada kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum?
 3. Wakatobi sebagian besar wilayahnya adalah wilayah pesisir. bagaimana peran Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam mengatasi persoalan kebersihan terkait pengelolaan sampah di kabupaten wakatobi khususnya di pulau wangi-wangi?
 4. Apa yang menjadi tugas bapak/ibu di kantor ini?
 5. Bagaimana pelayanan kebersihan untuk di wilayah pesisir dan pemukiman bajo?
 6. Bagaimana keterlibatan masyarakat masyarakat dalam pelayanan kebersihan di wakatobi?

7. Bagaimana system dan mekanisme pengangkutan sampah oleh kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum?
8. Akhir-akhir ini kebersihan dan keindahan kota wangi-wangi sering menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana tanggapan bapak selaku yang membidangi kebersihan?
9. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam kegiatan pelayanan kebersihan oleh kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum?

B. Masyarakat/Pelanggan

1. Bagaimana Peran kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan di masyarakat?
2. Apa bapak/ibu dengar tentang intruksi bebas sampah plastic di wakatobi?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui dan dilibatkan dalam program pelayanan kebersihan oleh kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum?
4. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum dalam meningkatkan pelayanan kebersihan di masyarakat?
5. Bagaimana kegiatan penyapuan jalan yang dilakukan oleh tenaga operasioal?
6. Bagaimana dengan ketersediaan fasilitas kebersihan di wilayah sekitar sini?

7. Menurut bapak/ibu, bagaimana pelayanan kebersihan untuk wilayah pesisir/pantai?
8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan?
9. Apakah pelayanan kebersihan oleh kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, dan Pekuburan Umum sudah sesuai dengan harapan bapak/ibu?

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. Muhammad husain
Jabatan : Kepala Kantor
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kantor KP2KP
Hasil Wawancara :

1. Pelayanan yang diberikan oleh kantor ini kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban melalui peraturan Bupati Wakatobi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tupoksi yang intinya terwujudkan wakatobi yang bersih, indah, teratur, aman dan mempesona. Ini memang merupakan cita-cita yang hendak dicapai oleh kantor KP2KP ini.
2. Fasilitas kebersihan yang kami miliki masih jauh dari standar yang diharapkan. Menurut perhitungan kami mobil dump truck pengangkut sampah minimal 8 buah, namun yang ada hanya 3 buah truk. Walaupun demikian kami tetap berupaya agar pelayanan yang kami berikan dapat dinikmati masyarakat luas.
3. salah satu yang kami lakukan dalam mendukung visi bupati wakatobi terutama yang berkaitan dengan sector pariwisata dan perikanan adalah mensinkronkan perencanaan yang menyentuh sektor pariwisata dan perikanan, melakukan kegiatan dan pengawasan secara rutin sehingga program yang sudah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Kantor KP2KP dengan keterbatasan ini kami mencoba memberdayakan semaksimal mungkin apa yang kami miliki demi terwujudnya wakatobi yang indah, teratur, aman dan mempeson.
4. Kami selalu anjurkan kemasyarakat untuk tidak membuang sampah plastic apalagi dibuang kelaut. Sudah beberapa kali instruksi dari bupati tentang Bebas sampah plastic, dan setiap Dinas, Badan dan Kantor mendapatkan tugas/wilayah kerja dan pengawasan sampah terutama sampah plastic. Setiap kali saya menghadap beliau selalu di ingatkan akan bahaya sampah plastic terutama yang dibuang kelaut karena sangat merusak ekosistem laut.
5. Kami selalu memprogramkan semua masukan dari masyarakat pada saat musrembang tetapi kalau sudah di TIM anggaran tidak sesuai lagi dengan yang kami programkan. Alasannya karena anggaran kurang pada hal program itu penting. Kalau bapak Tanya ke masyarakat begitu keinginanya dan mereka sudah usulkan. Contohnya TPS permanen banyak usulan dari masyarakat tetapi mereka tidak mau lokasinya di

simpankan TPS, dan juga pak bupati tidak mau ada TPS. TPS yang ada itu program dari buton yang kerjakan oleh dinas PU.

Nama : Aliodin
Jabatan : Kasi Kebersihan
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kantor KP2KP
Hasil Wawancara :

1. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok kami di bidang kebersihan lingkungan, kami selalu berupaya untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat terutama yang memberikan pengaduan akibat belum optimalnya kegiatan kami. Dalam memberikan pelayanan di bidang kebersihan, kami mengerjakan semua apa yang kami untuk kepuasan dan kesuksesan kegiatan dilapangan termasuk menambah jam kerja bila ada pekerjaan yang mendesak di masyarakat.
2. Sampah yang dihasilkan setiap hari kurang lebih 5 sampai 8 truk, tetapi kami hanya bisa mengangkat maksimal 6 truk.
3. Peralatan kebersihan memang masih sangat kurang. Bapak bisa bayangkan dari 11 desa dan kelurahan dalam ibu kota (kec. Wangsel Kel. Mandati I, Kel. Mandati II, Kel. Mandati II, Pertokoan Jabal Rahman, Desa mola selatan dan Desa mola Utara) sementara Kec. Wangi-Wangi (Kel.Pongo, Kel.Wangi, Kel. Wandoka, Kel. Wandoka utara, dan Kel.Wandoka selatan). hanya dilayani oleh 3 buah mobil. Untung kami masih bisa memberdayakan gerobak sehingga membantu mobil untuk mengumpulkan sampah. Personil kami hanya 45 orang yang melayani keseluruhan wilayah operasi termasuk tenaga penyapu jalan. Jadi fasilitas kami masih jauh dari harapan.
4. Untuk mewujudkan wakatobi yang bersih dan indah serta terhindar dari dampak negatif yang timbulkan oleh sampah, kami terus mengupayakan pengkajian sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi daerah yang sempit dan terbatasnya lokasi TPS dan TPA.
5. Bupati selalu konsisten dengan intruksinya bebas sampah plastik. Dulu tahun 2007 semua kantor di tugas pembersihan wilayah setiap hari jumat dan itu aktif pak setiap hari jumat”
6. Satu hal yang membebani pelayanan kami adalah pinggir pantai dan wilayah mola karena susah kami pantau sampah yang di buang di laut.
7. Banyak factor yang menyebabkan pelayanan kebersihan belum maksimal antara lain: Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah

terhadap kebersihan lingkungan, dana, dan masih banyak factor lainnya; Tahun 2007 dana alokasi untuk operasional kebersihan sekitar Rp..... Dan 2008 sebesar Rp 618.278.000 (Aliodin)

8. Untuk wilayah pesisir masih merupakan persoalan tersendiri bagi kami karena susah di pantau dan dijangkau oleh petugas, petugas kami hanya mengambil sampah di pinggir jalan dalam tong sampah, begitu juga dengan penyapu jalan. Ada petugas wilayah pantai tapi kadang sampah yang dibersihkan tertumpuk di pinggir pantai karena tidak dapat dijangkau gerobak apalagi tidak ada lorong. Kami butuh tambahan tenaga operasional karena wilayah pantai harus ada gerobak khusus yang bertugas di pantai. Sekarang belum ada karena gerobak kita terbatas.

Nama : Satiba

Jabatan : Pemegang barang

Wawancara : Maret- Juni 2008

Tempat : Kantor KP2KP

Hasil Wawancara :

Fasilitas kebersihan yang saya tahu selaku pemegang barang kantor hanya meliputi Dum truk 3, gerobak 40 buah (sebagian sudah rusak) dan beberapa peralatan lain seperti sekopang, sapu dan sendok rumput. Jadi memang masih sangat kurang sekali

Nama : Hazirun, SE

Jabatan : Pengawas Lapangan

Wawancara : Maret- Juni 2008

Tempat : Kantor KP2KP

Hasil Wawancara :

Tugas saya melakukan pengawasan sekaligus mengecek daftar hadir dilapangan bersama teman saya farid minanto. Kami belum bertugas sampai pengawasan pelaksanaan kebersihan karena kalau itu menjadi tugas kami maka petugas harus diperbanyak karena wilayah dari mola sampai wandoka itu jauh.

Nama : Rahmawati

Jabatan : Penagih Retribusi

Wawancara : Maret 2008

Tempat : Kantor KP2KP

Hasil Wawancara :

Tugas utama saya sebagai penagih retribusi pelayanan persampahan bersama Risno, Marwia dan Santi. Kendalanya banyak yang tidak mau

bayar karena sampahnya tidak diangkut atau kadang juga karena mereka tidak mau bayar alasanya sampahnya mereka bawa dikebunya.

Nama : Abubakar
Jabatan : Sopir Mobil Operasional
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : TPA
Hasil Wawancara :

1. Pengangkutan sampah banyak mengalami hambatan terutama kami yang bertugas mengangkat sampah. Kita sudah sampaikan agar sampah dibuang ke tong sampah atau kantong sampah, ataupun bahkan dos bekas tetapi masih banyak masyarakat beranggapan bahwa ada kebersihan yang akan mengurus sampah. Pembuangan sampah sudah disepakati bahwa diatas jam 07.00 jangan membuang sampah lagi di tong sampah kalau tong dibersihkan tetapi malah sebaliknya. Nanti jam 07.00 ke atas baru sampah dibuang ditong sampah. Jadi kadang-kadang kami tidak angkat lagi. Masalahnya mobil yang beroperasi hanya satu jadi kalau sudah jam 2 siang kita selesai membuang ke TPA tidak beroperasi lagi. Terpaksa sampah yang ada di tong nanti besoknya baru diambil. Jadi kalau bersih lingkungan seperti yang diharapkan maka harus ada penambahan mobil dan tenaga lapangan serta sosialisasi kemasyarakat tentang pentingnya jadwal pembuangan sampah.
2. Mobil perlu di tambah karena kami kewalahan apalagi hari senin atau ada acara/keramaian kita hampir gila mengangkut sampah.
3. Masyarakat dimandati dan mola sama saja, karena biar ada tong sampah kalau tidak di depan pagarnya mereka simpan saja di tanah katanya nanti diambil oleh kebersihan, kalau di mola susah karena kadang mereka buang dari kolom rumah karena rumah panggung mudah dijatuhkan kelaut.

Nama : LA OTI
Jabatan : Sopir Mobil Operasional
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : TPA
Hasil Wawancara :

1. Pelayanan di wilayah wanci cukup padat karena lorong yang besar banyak sementara mobil hanya satu, kadang sampah tidak terangkut semua kita sudah cape. Saya hanya mampu 2 x sehari sementara kalau diangku semua bisa 4x, jadi tidak akan pernah habis karena besok tambah lagi sampah baru

2. Solusinya ya tambah mobil, gerobak dan tenaga. Harusnya kecamatan bantu kita sampaikan ke masyarakat agar sampah dibuang sebelum kita angkut sekitar rumahnya. Ini baru habis diambil sudah ada lagi yang buang padahal mobil susah kalau main atrek apalagi jalanan ramai dan sempit.
3. Kendala kami dilapangan kebanyakan masyarakat yang berada dilapisan 2 sampai 4 rumah dari pinggir jalan tidak mau antar sampahnya ke pinggir jalan jadi kadang kami harus ambil dengan cara di pikul, bagus kalau tidak busuk

Nama : La Heri
Jabatan : Anggota Mobil Operasional
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : TPA
Hasil Wawancara :

1. Sarana penunjang kebersihan masih kurang misalnya terutama berhubungan dengan keselamatan kita karena kita bergelut dengan kotoran.
2. sebenarnya sampah ini bisa diatasi asalkan masyarakat menyimpan sampah pada tempat sampah dan dibuang sebelum kita mengangkut sampah. Ini sudah lihat kita angkut belum dibawa sampahnya nanti kita pergi baru dibuang ke tong sampah

Nama : LA ADE
Jabatan : Anggota Mobil Operasional
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : TPA
Hasil Wawancara :

1. Alat-alat kebersihan masih kurang terutama gerobak dan mobil pengangkut sampah ke TPA
2. Kendala kami dilapangan terutama masyarakat banyak yang tidak tepat waktu buang sampah dan sampah biasanya di buang dekat pagarnya saja tidak ada tong sampah. Kami juga sering sampaikan tapi mereka jawab ia tapi besok begitu juga

Nama : LA BUDI
Jabatan : Anggota Mobil Operasional
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : TPA
Hasil Wawancara :
1. Kendala banyak, mobil Cuma 1 buah diwilayah kami sementara sampah bisa sampai 3 mobil kalau kita putar ulang ambil yang sudah dilewati karena ada yang baru buang sampah.
2. Kalau masyarakat buang sampah sebelum jam 7 bagus supaya terangkut tapi sekarang buang sampah sampah suka-sukanya sehingga biasanya nanti besok lagi baru di ambil

Nama : LA NURU
Jabatan : Anggota Mobil Operasional
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : TPA
Hasil Wawancara :
1. Mobil seharusnya ditambah paling tidak 2 mobil satu wilayah, peralatan kebersihan yang ada dimobil ini sangat kurang, karena seharusnya alat-alat seperti sekopang, keranjang harus tetap ada di mobil, dulu ada setelah rusak tidak ada lagi. Jadi kami terhambat dalam bekerja karena peralatan kurang atau bahkan tidak ada lagi.
2. Masyarakat sebagian ada yang membantu dengan mengumpulkan sampah pada tong sampah tapi lebih banyak yang tidak pusing mau di buang di tong atau tidak, katanya ada orang kebersihan yang ambil.

Nama : MUH. YAMIN
Jabatan : Anggota Mobil Operasional
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : TPA
Hasil Wawancara :
Dijalur kami wilayah tengah cukup banyak sampah dan kami tidak bisa habiskan soalnya, gerobak sudah banyak yang rusak dan mobil hanya satu

Nama : La Pay
Jabatan : Pembawa gerobak
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Sentral Mola
Hasil Wawancara :

1. Masih perlu sosialisasi agar sampah disimpan pada tempat sampah. Kantong sampah yang kami berikan tidak digunakan untuk tempat sampah sehingga sampah mereka berhamburan disekitar pagar penduduk.
2. Tong sampah banyak yang hilang apalagi yang drum besi dijadikan tungku dapur. Sebaiknya diadakan tong sampah setiap rumah agar mereka di tugaskan satu-satu menjaganya. Kantong sampah yang kami bagikan di sekitar mola hanya 2 hari sudah banyak yang hilang karena karungnya bagus.
3. Di wilayah mola jarang kelihatan tong sampah dan perlu di adakan karena kalau tidak mereka buang di laut dan susah membersihkannya.

Nama : La Idi
Jabatan : Penyapu Jalan
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kelurahan Mandati I
Hasil Wawancara :

1. Sebenarnya sampah tidak terlalu banyak diwilayah saya tetapi mereka tidak simpan pada tempatnya sehingga kita yang menyapu kewalahan. Kesadaran masyarakat masih sangat kecil dalam menjaga kebersihan lingkungan.
2. Sosialisasi harus orang kantor, kita ini hanya menyapu saja tiap hari, kalau masyarakat ditegur soal sampah dibuang di tong mereka bilang itu tugasnya kebersihan

Nama : Akas Hamid
Jabatan : Masyarakat (Pengusaha Foto Copy)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kelurahan Mandati II
Hasil Wawancara :

1. Pelayanan kebersihan diwakatobi ini harus lebih ditingkatkan agar wakatobi betul-betul bisa menjadi tuan rumah bagi wisatawan yang

berkunjung. Hal yang perlu diperhatikan oleh kantor kebersihan adalah pembinaan dan penambahan tenaga lapangan agar betul-betul lebih profesional mengingat wakatobi khususnya pulau wangi-wangi sangat sempit sehingga kalau sampah tidak ditangani secara profesional maka tidak menutup kemungkinan wakatobi akan dilanda masalah sampah. Jadi mumpung baru dan sampah belum terlalu bermasalah mari kita galakan pembersihan lingkungan agar kita terhindar dari masalah sampah.

2. Kalau saya silakan buat tong sampah permanen tapi cari lokasinya yang tepat, kalau di depan kios saya itu tidak bisa karena disini banyak orang lalu lalang foto copy dan halaman saya sempit.
3. Kalau harapan saya, ya pemerintah terutama kantor kebersihan perbanyak sosialisasi, tapi lucu waktu sosialisasi kita sarankan tidak ada yang masuk dalam program mereka. Bingung kita padahal mereka minta masukan.
4. Yang perlu ditingkatkan sekarang adalah penambahan tenaga lapangan, melatih tenaga lapangan, penambahan tong sampah dan sosialisasi kemasyarakat supaya masyarakat tahu hak dan kewajibanya.
5. Pernah dengar tentang bebas sampah plastik tapi mau bagaimana siapa yang pilah sampahnya, tong kebersihan ada plastik dan non plastik tapi tong plastik itu sekitar 20 meter dan yang di depan itu hanya satu buah apa itu plastik atau non plastik.

Nama : Dewi Ratna
Jabatan : Masyarakat (Pengusaha Warung Makan sederhana)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kelurahan Mandati II
Hasil Wawancara :

1. Pelayanan Kebersihan sudah mulai nampak walaupun belum maksimal tetapi sudah nampak ada perubahan di bandingkan 2 tahun yang lalu. Pelayanan tetap harus dimaksimalkan lagi agar kota terlihat indah dan mempesona.
2. Perlu tambah tong sampah kalau perlu tong sampah permanen supaya sampah tidak terhambur disekitar tong sampah yang ada.
3. Tolong disediakan tong sampah disekitar sini nanti kami yang jaga kebersihanya kalau alasan pemerintah tidak buat tong permanen karena kotor dan bau. Kami siap pak asalkan pemerintah siapkan pengangkutanya kalau perlu gunakan penutup supaya tidak kelihatan jorok. Kami siap untuk menjaga kebersihan dan keamanannya.
4. Waduh kalau itu sih dengar tapi mau gimana lagi, tong di depan sana Cuma satu buah.

Nama : Wa Anta
Jabatan : Masyarakat (Kepala SD)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kelurahan Mandati II
Hasil Wawancara :

1. Pelayanan kebersihan perlu dijadwalkan kembali, karena siswa kami nanti jam 6.30 baru menyapu sementara petugas kebersihan jam 06.00 sudah lewat depan sekolah kami makanya sampah tetap ada di tong sampah nanti besok baru diambil. Kebersihan harus jalan dengan sore supaya dapat menjawab masalah ini.
2. Sebaiknya Pelayanan sampah dilakukan 2 kali sehari karena kami biasanya nanti jam 07.00 baru siswa membuang sampah.

Nama : Dirman
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Desa Mola
Hasil Wawancara :

1. Pelayanan kebersihan dimola belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan. Wilayah yang dilayani baru sekitar jalan poros lorong belum diambil. Mungkin mereka takut jatuh ke laut karena lorong sempit.
2. Kalau berhubungan dengan wilayah mola kendalanya besar karena jembatan mola tidak bisa dilewati gerobak.
3. Tambah tenaga dan gerobak, kalau gerobak susah karena jalan lebih baik ganti dengan sampan (koli-koli) supaya bisa dijangkau lebih jauh
4. Saya belum tau tentang instruksi itu.

Nama : La Daari
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat :
Hasil Wawancara :

1. Pelayanan di sini sudah bagus walaupun baru di mulai pebruari 2008 tetapi sudah ada perubahan dari sebelumnya. Mudah-mudahan pelayanan kebersihan lebih baik lagi supaya lingkungan kita bersih.
2. Kami belum memiliki tong sampah, yang ada hanya kantong sampah, kalau bisa siapkan tong sampah.

3. Belum dengar tentang bebas sampah plastik tapi kantong sampah depan rumah ada tulisan itu

Nama : Ardi Ndou
Jabatan : Masyarakat (Staf Desa)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Desa Mola
Hasil Wawancara :

Di desa kami ada bantuan tong sampah dari TNC dan masyarakat dianjurkan buang di tong sampah, tetapi siapa yang angkut kalau sudah penuh, TNC tidak mengangkut, jadi sebaiknya kebersihan ambil karena kalau tidak masyarakat buang kelaut kalau sudah penuh.

Nama : Firdaus
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Desa Mola Bahari
Hasil Wawancara :

1. Tambah tong sampah dan adakan pengalangan sampan (koli-koli) supaya semua wilayah bisa dijangkau. Kalau mau lebih bagus pelayanan di mola supaya angkat orang mola untuk operasional kebersihan.
2. Itu pak kalau orang mola yang diangkat pasti mereka lebih mengenal wilayah pesisir jadi sebaiknya angkat mereka dan siapkan peralatan kebersihan khusus untuk di laut (koli-koli, jaring sendok sampah)

Nama : Winda
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati I
Hasil Wawancara :

Sampah kita biasanya di buang kebelakang rumah nanti di bawa air pasang karena tong sampah ada dipinggir jalan baru Cuma 1 buah mau simpan di mana karena yang dipinggir jalan juga buang sampah, jadi kami lebih baik buang saja di dekat rumah langsung di bawa air laut. Ditong sampah kadang satu hari baru diangkat kadang juga tidak dan sudah busuk jadi mereka yang dipinggir jalan marah karena sampahnya busuk.

Nama : La Bajaa
Jabatan : Masyarakat (RM Wisata)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati II
Hasil Wawancara :

1. Sebagian buang sampah ke karung tapi sebagian kelaut karena karungnya sudah penuh apalagi petugas sampah tidak ambil kadang sudah busuk makanya biasanya langsung di buang kelaut.
2. Harusnya kebersihan langsung ambil karena ini sudah di tau kalau wisata banyak sampah. Di sini hanya dos makanan dan sisa-sisa makanan saja dan cepat busuk.

Nama : Erniwati
Jabatan : Masyarakat (RM Wisata)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati II
Hasil Wawancara :

1. Tolong kastau kebersihan pak supaya sampah di wisata diperhatikan jangan Cuma tagih retribusi, karena kalau tidak diambil dan sudah busuk karyawan kami akan buang di laut sementara kita dianjurkan untuk tidak membuang sampah ke laut.
2. Pak kalau kebersihan mau, simpankan gerobak di sekitar sini supaya kami langsung buang kegerobak asal cepat di ambil supaya tidak busuk.
3. Pernah dengar tentang bebas sampah plastik tetapi bagaimana maksudnya kami belum paham, lalu siapa yang pilah sampah plastik pak. Repot pak kita banyak kerja.

Nama : Rahman T
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati III
Hasil Wawancara :

Peran kantor kebersihan masih perlu ditingkatkan supaya kota jadi bersih dan harus banyak sosialisasi kemasyarakat supaya tau program kebersihan seperti apa. Masyarakat ini mau lingkunganya bersih maka dari itu petugas harus turun kemasyarakat adakan himbauan kebersihan atau kalau perlu adakan lomba kebersihan lingkungan supaya masyarakat terbiasa membersihkan lingkungan masing-masing.

Nama : Masudin
Jabatan : Masyarakat(Radio Bandsol)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati III
Hasil Wawancara :

1. untuk bekerja mewujudkan lingkungan yang bersih, kami tidak perlu harus diberi anggaran. Asal persoalan itu dikomunikasikan, kita tetap bisa berjalan bersama. Buktinya, kami tetap jalan untuk mewujudkan visi kami walaupun tanpa anggaran yang mereka berikan kepada kami
2. untuk mewujudkan Wakatobi dengan lingkungan yang lebih baik, kami akan selalu komitmen memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik dalam bentuk dialog interaktif maupun pemutaran iklan dan kuis berhadiah

Nama : Wati
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati III
Hasil Wawancara :

Peran kantor kebersihan sangat penting karena masalah sampah diwakatobi cukup banyak dan masyarakat kadang-kadang membuang sampah bukan pada tempatnya. Mereka lebih baik cari gampang saja. Dekat rumah saya ini banyak yang buang dibelakang karena masih banyak tanah kosong Cuma itu bau apalagi hujan. Jadi sebaiknya kebersihan harus banyak sosialisasi agar masyarakat tahu tentang pentingnya lingkungan yang bersih.

Nama : H. Husma
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati III
Hasil Wawancara :

Tenaga lapangan khususnya penyapu jalan harus diperbanyak terutama yang ada di jalan raya. Sekitar sini belum ada penyapu jalan, gerobak saja hanya satu sementara wilayah ini padat dan luas. Harusnya disini ada tong sampah permanen yang besar bukan hanya tong drum. Bayangkan disini ada swalayan jabal rahman tapi pengelola sampah belum banyak. Sampah disana sini banyak yang berhamburan karena tidak diangkut oleh petugas, atau karena belum masuk wilayah tagihan retribusi. Sebaiknya kebersihan diperhatikan.

Nama : Rudi
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati I
Hasil Wawancara :

1. Kantor kebersihan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, namun masalah sampah belum bisa di atasi dengan baik, masih banyak sampah yang belum terangkut sampai sore harusnya tambah personil supaya bergiliran pagi dan sore.
2. Sampah masih banyak disekitar pinggir pantai karena yang diangkut baru sebatas pinggir jalan yang dipantai sana belum ada. Kalau ada petugasnya tapi disini belum ada

Nama : Salim Ode, SE
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati I
Hasil Wawancara :

1. Kegiatan pelayanan kebersihan belum maksimal terutama manajemen yang digunakan belum mampu menyentuh persoalan di masyarakat. Kalau manajemennya mantap tidak ada pekerjaan yang sulit, apalagi hanya persoalan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga.
2. Kekurangan fasilitas kebersihan seharusnya disiasati dengan sosialisasi dimasyarakat agar mereka menyadari akan pentingnya lingkungan yang bersih sehingga mereka ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
3. Pernah dengar tentang intruksi bebas sampah plastik, tapi harusnya diawali dengan sosialisasi tentang bahaya dan manfaat dari sampah plastik. Siapkan sarana yang mendukung instruksi itu.

Nama : Hj. Wa Kalambe
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Mandati I
Hasil Wawancara :
Pelayanan kebersihan sudah dilaksanakan dengan maksimal, tetapi kadang-kadang kita masyarakat belum memahami pentingnya kebersihan. Sekitar rumah saya masing banyak yang buang sampah di halaman

belakang yang tanah kosong. Mereka tidak pikir bahwa kalau hujan sampah itu akan busuk dan menimbulkan penyakit.

Nama : Ali Basaru
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Wanci
Hasil Wawancara :

sebagai salah seorang staf lembaga komingku menambahkan bahwa dua minggu lalu (tanggal 5 – 9 Januari) melakukan kerjasama dengan siswa-siswa SLTP dan SLTA di Kapota untuk melakukan perjalanan memasuki hutan dengan tujuan menumbuhkan kecintaan generasi mudah itu terhadap lingkungan sehingga ada kepedulian dalam diri generasi mudah itu untuk menjaga dan memelihara lingkungan hutan dari pengrusakan

Nama : Harviyadin
Jabatan : Masyarakat (radio Komingku)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Wanci
Hasil Wawancara :

untuk berkolaborasi dengan instansi lain dalam mewujudkan Wakatobi yang bersih tidak mesti bentuknya dengan menggunakan uang, akan tetapi asal ada komunikasi yang terbuka kita tetap bisa berkolaborasi untuk mewujudkan visi yang telah kita buat". Lembaga komingku hingga kini tetap berupaya mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan sekitarnya.

Nama : Ibu Najwa
Jabatan : Masyarakat (dasa wisma melati)
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Wanci
Hasil Wawancara :

kami merasa bersyukur atas pelatihan pembuatan kompos yang dipelopori lembaga Komingku. Pupuk kompos yang dihasilkan dari pelatihan tersebut sudah kami manfaatkan untuk menyuburkan tanaman kelompok dasawisma kami sehingga bisa tumbuh subur. Dan pada lomba tingkat kabupaten mengenai keindahan dasawisma, kelompok kami menjadi salah satu kelompok pemenang.

Nama : LA MUSA
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Pongo
Hasil Wawancara :
1. Harapan kami ya kebersihan lebih maksimal bekerja supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2. Pelayanannya sudah bagus tinggal bagaimana upaya mereka agar masyarakat ikut menjaga kebersihan, jangan sampai baru penyapu jalan pulang sampah sudah mulai terhambur
3. Tempat penampungan sampah harus diperbanyak minimal 1 buah setiap rumah

Nama : LA DUNDU
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Pongo
Hasil Wawancara :
Kebersihan harus tambah tenaga lapangan supaya mereka bagi wilayah pengangkutan dengan gerobak. Usahakan 1 atau 2 lorong tersedia 1 petugas.

Nama : NASARIA
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Pongo
Hasil Wawancara :
Pemerintah masih kurang sosialisasinya pak, harusnya bikin kerja sama dengan kita dalam rangka kebersihan. Kita selalu kerja bakti dengan ibu-ibu dasa wisma setiap hari sabtu.

Nama : BOBI NAHAPAR
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Wandoka
Hasil Wawancara :
Kami berharap agar kebersihan banyak-banyak sosialisasi, apalagi dengan instruksi bebas sampah plastik yang sarannya belum terpenuhi. Tong sampah hanya satu buah setiap tempat.

Nama : RABANIA
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Wandoka
Hasil Wawancara :
Ia pak dengar dari beberapa pegawai yang sering kerja bakti tapi saya tidak mengerti bebas sampah plastik yang bagaimana, apa tidak menggunakan peralatan plastik atau membuang/memungut sampah plastik.

Nama : RAHMAN
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Wandoka
Hasil Wawancara :
1. Pelayanan kebersihan di wandoka ini belum banyak pak karena baru dimulai untuk wilayah sini, mudah-mudahan lingkungan tambah bersih.
2. Kebersihan harus memperbanyak tempat sampah karena biar sudah di sapu kalau tidak ada ada tempatnya akan terhambur

Nama : MIDUNG
Jabatan : Masyarakat
Wawancara : Maret- Juni 2008
Tempat : Kel. Wandoka
Hasil Wawancara :
Masyarakat mau saja apalagi itu untuk kebaikan masyarakat, tapi kita belum mengerti bebas sampah plastik itu bagaimana. Mungkin kebersihan akan sosialisasi nanti tentang sampah plastik ini karena itu hanya kita dengar dari para pegawai

DATA INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	L/P	USIA	LINGKUNGAN	JABATAN/PEKERJAAN	KET
1	Drs. MUH. HUSAIN	L	54 Thn	Kantor KP2KP	Kepala Kantor	
2	MUHIDIN, S.Pd	L	40 Thn	Kantor KP2KP	Kasubag. TU	
3	ALIODDIN	L	55 Thn	Kantor KP2KP	Kasi Kebersihan	
4	SATIBA	P	27 Thn	Kantor KP2KP	Pemegang Barang	
5	FARID MINANTO	L	27 Thn	Kantor KP2KP	Pengawas Lapangan	
6	HAZIRUN	L	30 Thn	Kantor KP2KP	Pengawas Lapangan	
7	ABUBAKAR	L	24 Thn	Kantor KP2KP	Sopir Mobil Oper. Kebersihan	
8	LA OTI	L	24 Thn	Kantor KP2KP	Sopir Mobil Oper. Kebersihan	
9	LA HERI	L	21 Thn	Kantor KP2KP	Ang. Mobil Oper. Kebersihan	
10	LA PAY	L	32 Thn	Kantor KP2KP	Pembawa Geobak Sampah	
11	LA TONO	L	31 Thn	Kantor KP2KP	Ang. Mobil Oper. Kebersihan	
12	NURDIN	L	34 Thn	Kantor KP2KP	Ang. Mobil Oper. Kebersihan	
13	LA ANE D	L	43 Thn	Kantor KP2KP	Pembersih Pesisir Pantai	
14	MUZAIR	L	33 Thn	Kantor KP2KP	Pembersih Pesisir Pantai	
15	SUHUWIA	P	45 Thn	Kantor KP2KP	Pembersih Pesisir Pantai	
16	LA ODO	L	62 Thn	Kantor KP2KP	penyapu jalan	
17	ALIMUDIN	L	34 Thn	Kantor KP2KP	penyapu jalan	
18	LA ODE ISI	L	55 Thn	Kantor KP2KP	penyapu jalan	
19	LA KADERE	L	35 Thn	Kantor KP2KP	ANG. MOBIL	
20	MAHASURA WOLE	L	44 Thn	Kantor KP2KP	ANG. MOBIL	
21	LAMOANE O	L	44 Thn	Kantor KP2KP	ANG. MOBIL	
22	RISNO	L	37 Thn	Kantor KP2KP	Pembersih Ling/Gerobak	
23	SARDIA	L	29 Thn	Kantor KP2KP	Pembersih Ling/Gerobak	
24	SURIANTO	L	33 Thn	Kantor KP2KP	Pembersih Ling/Gerobak	
25	Rahman T	L	33 Thn	Kel. Mandati II	Masyarakat	
26	Masudin	L	33 Thn	Kel. Mandati III	Masyarakat (Bandsol)	
27	Wati	P	35 Thn	Kel. Mandati III	Karyawan Hotel	
28	H. Husman	L	62 Thn	Kel. Mandati III	Wiraswasta	
29	AKAS H.	L	31 Thn	Kel. Mandati II	Pengusaha foto Copy	
30	Dewi Ratna	P	45 Thn	Kel. Mandati II	Pengusahaan Rumah Makan	
31	La Bajaa	L	47 Thn	Kel. Mandati II	Pegawai RM Wisata	
32	Erniwati	P	37 Thn	Kel. Mandati II	Pengusaha RM Wisata	
33	Rudi	L	34 Thn	Kel. Mandati I	Masyarakat/Petani	
34	Salim Ode	L	26 Thn	Kel. Mandati I	Masyarakat/Wiraswasta	
35	Wa Anta	P	44 Thn	Kel. Mandati I	Kepala SDN Mandati II	
36	Hj. Wa Kalambe	P	52 Thn	Kel. Mandati I	Kepala TK	
37	Ali Basaru	L	34 Thn	Kel. Wanci	Masyarakat (Staf komingku)	
38	Harviyadin	L	45 Thn	Kel. Wanci	Radio Komingku	
39	Ibu Najwa	P	55 Thn	Kel. Wanci	Masyarakat (Dasa Wisma)	
40	Ardi Ndou	L	43 Thn	Desa Mola	Masyarakat	

NO	NAMA	L/P	USIA	LINGKUNGAN	JABATAN/PEKERJAAN	KET
41	La Daari	L	35 Thn	Desa Mola	Masyarakat	
42	Dirman	L	36 Thn	Desa Mola	Masyarakat	
43	Firdaus (mola)	L	44 Thn	Desa Mola	Masyarakat	
44	LA MUSA	L	28 Thn	Kel. Pongo	Masyarakat	
45	LA DUNDU	L	44 Thn	Kel. Pongo	Masyarakat	
46	NASARIA	P	42 Thn	Kel. Pongo	Masyarakat	
47	BOBI NAHAPAR	L	33 Thn	Kel. Wandoka	Masyarakat	
48	RABANIA	L	32 Thn	Kel. Wandoka	Masyarakat	
49	RAHMAN	L	33 Thn	Kel. Wandoka	Masyarakat	
50	MIDUNG	L	34 Thn	Kel. Wandoka	Masyarakat	

UNIVERSITAS TERBUKA

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **Muhidin, S.Pd**
2. Tempat dan Tanggal Lahir : **Mandati, 31 Desember 1968**
3. Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil Daerah**
4. Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina, IV/a**
5. NIP : **19681231 199802 1 021**
6. Agama : **Islam**
7. Pendidikan :
 - a. **SDN 3 Mandati II Tahun 1984**
 - b. **SMPN 1 Wangi-Wangi Tahun 1987**
 - c. **SMAN 1 Wangi-Wangi Tahun 1990**
 - d. **Unhalu Kendari Tahun 1995**
8. Riwayat Pekerjaan :
 - a. **Guru SMPN 4 Lasolo Kendari Sulawesi Tenggara Tahun 1998 s/d 2003;**
 - b. **Guru SMA Negeri 1 Wangi-Wangi Kabupaten Buton 2003 s/d 2004;**
 - c. **Kepala Sub Bagian Perencanaan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi 2004 s/d 2006;;**
 - d. **Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai pada BKD Kabupaten Wakatobi 2006;**
 - e. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum Kabupaten Wakatobi tahun 2006 s/d 2009;**
 - f. **Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 sampai sekarang.**



BUPATI WAKATOBI

INSTRUKSI BUPATI WAKATOBI NOMOR : 321-ATAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN JUM'AT BERSIH TANPA SAMPAH PLASTIK
DIRUBAH MENJADI PELAKSANAAN KEGIATAN SABTU BERSIH TANPA
SAMPAH PLASTIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Sampah dan menindaklanjuti Pencanangan *Bupati Wakatobi Tanggal 30 Maret 2007* tentang Pelaksanaan *Jum'at Bersih Tanpa Sampah Plastik*, maka perlu menerbitkan Instruksi Pelaksanaan Kegiatan Jum'at Bersih Tanpa Sampah Plastik diubah menjadi Pelaksanaan kegiatan Sabtu Bersih Tanpa Sampah Plastik;
- b. bahwa Kegiatan Sabtu Bersih Tanpa Sampah Plastik adalah sinkronisasi dan implementasi Visi Pemerintah Kabupaten Wakatobi, yaitu *Terwujudnya Surga Nyata di Bawah Laut di Jantung Segitiga Karang Dunia*;
- c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Instruksi Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Sampah.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi;
 3. Kepala Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 4. Camat se-Kabupaten Wakatobi;
 5. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Wakatobi.
 6. Ka. UPTD dan Para Kepala Sekolah se- Kabupaten Wakatobi.

Untuk :
PERTAMA : Memerintahkan semua Pegawai yang ada di lingkup kerjanya untuk bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan Sabtu Bersih Tanpa Sampah Plastik;

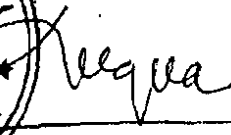
KEDUA : Kegiatan Sabtu Bersih dilaksanakan setelah selesai Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di lingkungan SKPD masing-masing;

KETIGA : Pemantauan, Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi secara terpadu;

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati Wakatobi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Instruksi Bupati Wakatobi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di : Wangi - Wangi
Pada tanggal : 03 Nopember 2008


BUPATI WAKATOBI,

Ir. HUGUA



BUPATI WAKATOBI

INSTRUKSI BUPATI WAKATOBI

NOMOR : **88** TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN JUM'AT BERSIH TANPA SAMPAH PLASTIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Sampah dan menindaklanjuti Pencanangan *Bupati Wakatobi Tanggal 30 Maret 2007* tentang Pelaksanaan *Jum'at Bersih Tanpa Sampah Plastik*, maka perlu menerbitkan Instruksi Pelaksanaan Kegiatan Jum'at Bersih Tanpa Sampah Plastik;
- b. bahwa Kegiatan Jum'at Bersih Tanpa Sampah Plastik adalah sinkronisasi dan implementasi Visi Pemerintah Kabupaten Wakatobi, yaitu *Terwujudnya Surga Nyata di Bawah Laut di Jantung Segitiga Karang Dunia*;
- c. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Instruksi Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Sampah.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi;
2. sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi;
3. Kepala Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
4. Camat se-Kabupaten Wakatobi;
5. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Wakatobi;
6. Ka. UPTD dan Kepala Sekolah se- Kabupaten Wakatobi.

Untuk PERTAMA : Memerintahkan semua Pegawai yang ada di lingkup kerjanya untuk bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan Jum'at Bersih Tanpa Sampah Plastik;

KEDUA : Kegiatan Jum'at Bersih dilaksanakan mulai jam 06.30 sampai 08.00 WITA di lingkungan kerja masing-masing dan lokasi-lokasi khusus yang ditentukan;

KETIGA : Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi;

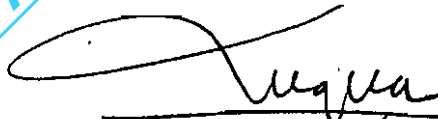
KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati Wakatobi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Instruksi Bupati Wakatobi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di: Wangi - Wangi

Pada tanggal : **9 APRIL 2007**

BUPATI WAKATOBI.


Ir. HUGUA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Terbuka

UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH KENDARI

Jl. Jend. A. Yani No. 68 Wua-Wua
Kendari 93117Telepon/Fax : (0401)390644 (Umum)
Telepon : (0401)3008744 (Kepala)
E-Mail : ut-kendari@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 813 /H31.48/KM/2009
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

8 Juni 2009

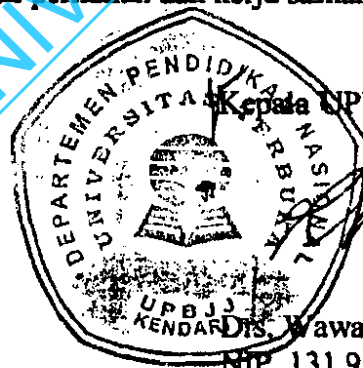
Kepada Yth.

Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran
dan Pekuburan Umum Kabupaten WakatobiDi –
Wanci

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penyelesaian studi Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian di lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhidin
No. Stambuk : 014629697
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul Penelitian : Peranan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Pekuburan Umum Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi)
Angkatan : 2007.1
Waktu Penelitian : Januari s.d Maret 2009

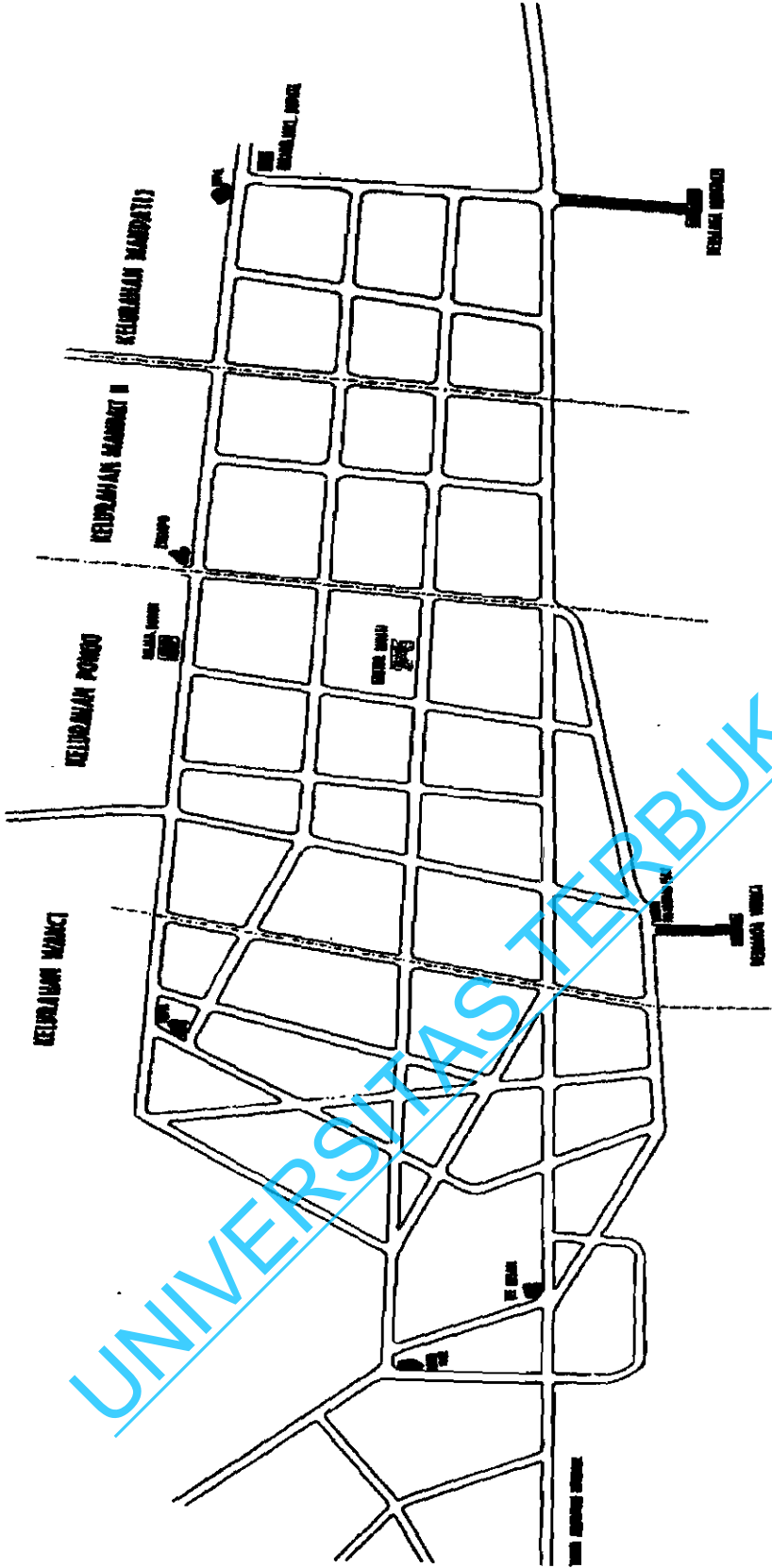
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Kepala UPBJJ-UT Kendari,

Drs. Wawan Ruswanto, M.Si
NIP. 131 950 950

RUTE PELAYANAN SAMPAH



DOKUMEN PENGELOLAAN SAMPAH
KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PEKUBURAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI



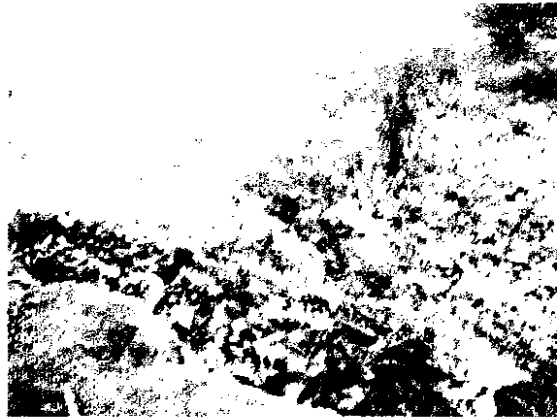
Gbr. Kegiatan pengangkutan sampah



Gbr . Kegiatan Pemotongan Rumput



Kegiatan Siswa Pramuka dalam Gerakan Bebas Sampah Plastik



Kegiatan Pembuangan dan pembakaran sampah di lokasi pembuangan sampah sementara (Bukan di TPA) milik kebersihan



Pengelolaan kebersihan di mola

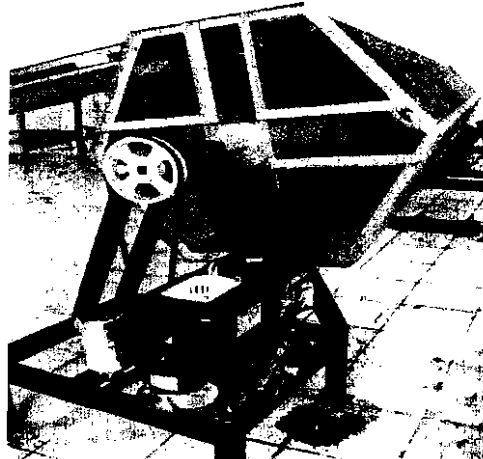
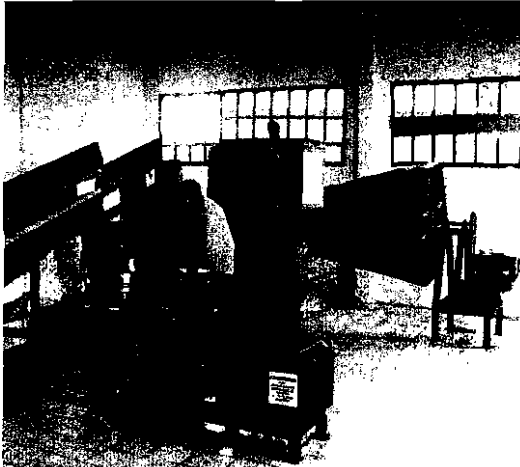


Kegiatan Pendistribusian karung

Kegiatan Pengangkutan sampah



Mesin Pengelola/Pencacah Sampah Organik dan Non Organik



UNIVERSITAS TERBUKA

Kegiatan Sosialisasi pelayanan persampahan di Wangi-Wangi

